



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

---

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR PR.01/KEP-538/K/SU/2022

TENTANG

AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN

DAN AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa fokus pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, perlu diarahkan pada hal-hal yang bersifat strategis;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang menjadi perhatian Presiden dan para pemangku kepentingan, perlu disusun Program Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Agenda Prioritas Pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
  5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan dan Pembangunan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

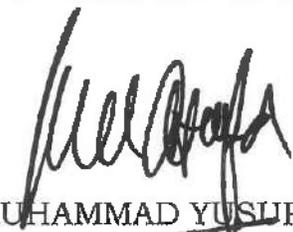
- KESATU** : Menetapkan Agenda Prioritas Pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut APP dan APPD Tahun 2023.
- KEDUA** : APP dan APPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- KETIGA** : APP Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEEMPAT** : APPD Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KELIMA** : APP dan APPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman untuk melaksanakan Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023.
- KEENAM** : APP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:
1. Sektor Strategis Pemerintah yang terdiri dari 7 (tujuh) sektor;
  2. Tema Pengawasan Strategis yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) tema; dan
  3. Topik Prioritas yang terdiri dari 105 (seratus lima) topik.

- KETUJUH : APPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT meliputi:
1. 5 (lima) sektor prioritas daerah; dan
  2. 64 (enam puluh empat) tema prioritas daerah.
- KEDELAPAN : Informasi hasil pengawasan, sektor, tema, dan topik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan KETUJUH bersifat minimal dan dapat disesuaikan dengan perkembangan Agenda Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- KESEMBILAN : APP dan APPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA, 



MUHAMMAD YUSUF ATEH

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 NOMOR PR.01/KEP-538/K/SU/2022  
 TENTANG  
 AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN  
 DAN AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN  
 DAERAH TAHUN 2023

AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2023

SEKTOR/TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
			I 4	II 5	III 6	IV 7
A	1. Ketepatan desain bauran kebijakan pemerintah terkait reformasi pembangunan SDM, khususnya pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2. Intervensi alokasi anggaran pemerintah pusat untuk peningkatan kualitas SDM, khususnya pada peningkatan IPM; 3. Sebaran IPM regional dibandingkan dengan alokasi belanja daerah per kapita untuk pembangunan SDM; 4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan; 5. Peningkatan kualitas dan jangkauan program kesejahteraan sosial;	D2				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I	II	III	IV
				4	5	6	7
		6. Rekomendasi kebijakan terkait upaya reformasi pembangunan SDM.					
A.1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk sektor pendidikan serta prioritas penggunaannya (baik untuk aspek aksesibilitas dan aspek kualitas pendidikan);</li> <li>2. Gambaran sebaran aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Indonesia;</li> <li>3. Analisis efektivitas Program BOS dan PIP (Bantuan Pendidikan) dalam mendorong peningkatan aksesibilitas pendidikan (APK-APM);</li> <li>4. Analisis efektivitas peningkatan sarpras, sebaran dan pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, dan resiliensi satuan pendidikan, serta penerapan pemajuan kebudayaan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan (Asesmen Nasional/AN);</li> <li>5. Analisis peningkatan kualitas, relevansi, dan aksesibilitas pendidikan tinggi serta pelaksanaan dan pelatihan vokasi dalam menekan angka pengangguran.</li> </ol>	D2			V	
A.1.a	Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis perencanaan kebutuhan (kecukupan/ketersediaan) sarpras pendidikan, serta gambaran sebaran sarpras pendidikan;</li> <li>2. Analisis alokasi pendanaan pusat dan daerah (PAD), dan ketepatan sasaran peningkatan sarpras pendidikan;</li> <li>3. Akuntabilitas pelaksanaan peningkatan sarpras pendidikan;</li> <li>4. Sarpras untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis efektivitas peningkatan sarpras dalam</li> </ul> </li> </ol>	D2			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I	II	III	IV
				4	5	6	7
		<p>mendorong kualitas pendidikan pendidikan;</p> <p>5. Sarpras untuk Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis kecukupan jumlah ruang kelas terhadap rombongan belajar;</li> <li>- Analisis efektivitas kebijakan zonasi PPDB dalam mendorong pemerataan aksesibilitas pendidikan;</li> </ul> <p>6. Permasalahan dan hambatan pemenuhan kebutuhan sarpras pendidikan;</p> <p>7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>					
A.1.b	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	<p>1. Analisis perencanaan dan ketepatan alokasi dana BOS;</p> <p>2. Kelancaran penyaluran dana BOS;</p> <p>3. Ketepatan dan akuntabilitas penggunaan anggaran BOS;</p> <p>4. Kecukupan dan Kebermanfaatan dana BOS dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah;</p> <p>5. Efektivitas dana BOS dalam mendorong aksesibilitas pendidikan;</p> <p>6. Hambatan penyaluran dan pemanfaatan dana BOS;</p> <p>7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>	D2			V	
A.1.c	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	<p>1. Pendidikan Vokasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis keselarasan kebijakan pendidikan vokasi antar K/L/P;</li> <li>- Gambaran kebutuhan dan proyeksi tenaga kerja per sektor per daerah;</li> <li>- Gambaran sebaran kualitas dan kesesuaian kebutuhan pendidikan vokasi;</li> <li>- Analisis pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, sarpras dan kurikulum pendidikan vokasi, serta penguatan program <i>link and match</i> untuk mendorong</li> </ul>	D2			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
		<p>keterserapan tenaga kerja lulusan vokasi di Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran jumlah dan sebaran lulusan pendidikan vokasi di daerah yang sesuai DUDIKA;</li> <li>- Analisis pemanfaatan hasil produk riset terapan satuan pendidikan/PTN vokasi oleh pelaku dunia usaha dan dunia industri;</li> <li>- Permasalahan dan hambatan penguatan pelatihan vokasi;</li> <li>- Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</li> </ul> <p>2. Pelatihan Vokasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis keselarasan kebijakan pelatihan vokasi antar K/L/P;</li> <li>- Gambaran kebutuhan dan proyeksi tenaga kerja per sektor per daerah;</li> <li>- Analisis link and match dengan pasar kerja untuk pelatihan vokasi – kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDIKA;</li> <li>- Gambaran jumlah dan sebaran lulusan pelatihan vokasi di daerah yang sesuai DUDIKA;</li> <li>- Permasalahan dan hambatan penguatan pelatihan vokasi;</li> <li>- Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</li> </ul>					
A.1.d	Kinerja Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran sebaran kualitas pendidikan tinggi di Indonesia;</li> <li>2. Analisis akuntabilitas dana bantuan pemerintah dalam mendorong kualitas perguruan tinggi dan dalam menekan biaya operasional bagi mahasiswa (Uang Kuliah Tunggal), dan meningkatkan aksesibilitas</li> </ol>	D2			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>pendidikan tinggi;</p> <p>3. Analisis pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarpras dalam mendorong kualitas pendidikan tinggi;</p> <p>4. Analisis kualitas pendidikan tinggi terhadap keterserapan tenaga kerja;</p> <p>5. Hambatan dan permasalahan kinerja pendidikan tinggi;</p> <p>6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>					
A.1.e	Pemajuan Kebudayaan	<p>1. Analisis desain kebijakan pemajuan kebudayaan dan keselarasannya antar K/L/P;</p> <p>2. Gambaran sebaran pembangunan kebudayaan di Indonesia;</p> <p>3. Inventarisasi objek kebudayaan yang rentan hilang/punah di pusat maupun di daerah;</p> <p>4. Analisis penyusunan kurikulum muatan lokal berdasarkan hasil inventarisasi kebudayaan;</p> <p>5. Efektivitas kurikulum muatan lokal terhadap pembentukan karakter (kualitas pendidikan);</p> <p>6. Analisis alokasi dan akuntabilitas anggaran pusat dan daerah, sekaligus dana abadi kebudayaan dalam mendorong pemajuan kebudayaan di Indonesia;</p> <p>7. Hambatan dan permasalahan pemajuan kebudayaan;</p> <p>8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>	D2			V	
A.1.f	Resiliensi Pendidikan Nasional	<p>1. Kebijakan dan komitmen anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong ketahanan sistem pembelajaran dalam menghadapi <i>external shocks</i>;</p> <p>2. Gambaran sebaran kuantitas dan kualitas sarpras pendukung resiliensi pendidikan pada tingkat daerah</p>	D2			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>hingga satuan pendidikan;</p> <p>3. Analisis kurikulum yang adaptif dalam menghadapi <i>external shocks</i>;</p> <p>4. Analisis pemenuhan tenaga pendidik dengan kapabilitas pengajaran adaptif;</p> <p>5. Permasalahan dan hambatan dalam penerapan resiliensi pendidikan nasional;</p> <p>6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>					
A.2	Kesehatan	<p>1. Analisis kesiapan sistem kesehatan menuju endemi;</p> <p>2. Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk sektor kesehatan serta prioritas penggunaannya;</p> <p>3. Analisis keselarasan program pemerintah menjamin kepastian seluruh masyarakat mempunyai akses untuk pelayanan kesehatan;</p> <p>4. Analisis efektivitas sistem kesehatan nasional dalam pencapaian indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup dan Angka Harapan Hidup Sehat);</p> <p>5. Analisis atas pemerataan aksesibilitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan;</p> <p>6. Analisis perkembangan reformasi sistem kesehatan (layanan primer, rujukan, digitalisasi dan adaptif).</p>	D2		V		
A.2.a	Sistem Kesehatan Nasional	<p>1. Kepastian Pelayanan Kesehatan (Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis kecukupan dan ketepatan design kebijakan pemerintah mencapai <i>Universal Health Care</i>;</li> <li>- Analisis ketepatan dan kecukupan atas kebijakan terkait peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan nasional;</li> </ul>	D2		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I	II	III	IV
				4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis atas kesetaraan perlakuan mendapatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat (peserta PBI maupun Non-PBI);</li> <li>- Analisis <i>burden sharing</i> atas peran pemerintah pusat dan daerah dalam sistem kesehatan nasional;</li> <li>- Analisis atas kecepatan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan;</li> <li>- Analisis efektivitas layanan kesehatan terhadap indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup dan Angka Harapan Hidup Sehat);</li> </ul> <p>2. Pembiayaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan basis data peserta Jaminan Kesehatan Nasional;</li> <li>- Akuntabilitas dan tata kelola pembayaran PBI JKN;</li> <li>- Burden sharing pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional antara pemerintah pusat dan daerah;</li> <li>- Analisis penerapan kebijakan single tarif JKN (kesiapan Rumah Sakit dan penghitungan tarif INA-CBG);</li> <li>- Sustainability program JKN dampak penerrapan single tarif.</li> </ul>					
A.2.b	Reformasi sistem kesehatan - layanan primer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis ketepatan dan kecukupan kebijakan Peningkatan Layanan Kesehatan Primer;</li> <li>2. Analsis Burden sharing antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan peningkatan layanan primer;</li> <li>3. Kondisi kapasitas, kapabilitas dan sebaran layanan kesehatan primer (tenaga kesehatan, obat dan sarana prasarana) untuk meningkatkan aksesibilitas</li> </ol>	D2		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		kesehatan; 4. Kualitas atas layanan kesehatan primer (pemenuhan Standar Pelayanan Minimal); 5. Implementasi dan tata kelola peningkatan pelayanan Preventif dan Promotif Kesehatan (GERMAS), kuratif dan rehabilitatif oleh FKTP; 6. Akuntabilitas penggunaan dana kapitasi FKTP; 7. Analisis disiplin atas implementasi sistem rujukan; 8. Analisis efektivitas penggunaan dana kapitasi terhadap kualitas pelayanan FKTP; 9. Permasalahan dan Hambatan Peningkatan Layanan Kesehatan Primer; 10. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi.					
A.2.c	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	1. Analisis Ketepatan Kebijakan Peningkatan Layanan Kesehatan Rujukan; 2. Analisis burden sharing antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan layanan kesehatan rujukan; 3. Kondisi kapasitas, kapabilitas dan aksesibilitas layanan kesehatan rujukan (tenaga kesehatan, obat dan sarana prasarana); 4. Kualitas atas layanan kesehatan Rujukan dan akreditasi Rumah Sakit; 5. Permasalahan dan Hambatan Peningkatan Layanan Kesehatan Primer; 6. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi.	D2		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
A.2.d	Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis ketepatan Kebijakan Program Pengembangan Kompetensi dan Program Distribusi Tenaga Kesehatan;</li> <li>2. Analisis kesesuaian dan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait pemerataan tenaga kesehatan;</li> <li>3. Gambaran Kondisi Sebaran dan Kualitas Tenaga Kesehatan pada Pemerintah Pusat dan Daerah;</li> <li>4. Akuntabilitas dan tata kelola atas peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan;</li> <li>5. Permasalahan dan Hambatan Peningkatan Kualitas dan Distribusi Tenaga Kesehatan;</li> <li>6. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi.</li> </ol>	D2		V		
A.2.e	Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Desain Kebijakan Sistem Pengendalian Penyakit;</li> <li>2. Analisis Program Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi;</li> <li>3. Analisis Kecukupan dan Ketersediaan Sarana Pendukung Surveilans dan Laboratorium;</li> <li>4. Analisis Kecukupan dan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;</li> <li>5. Analisis Kecukupan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan;</li> <li>6. Permasalahan dan Hambatan Penguatan Pengendalian Penyakit;</li> <li>7. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi.</li> </ol>	D2		V		
A.2.f	Penguatan Inovasi dan Teknologi Kesehatan (Digitalisasi Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Kebijakan Strategi Transformasi Digital Kesehatan;</li> </ol>	D2		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Renda PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
	Kesehatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Kesiapan infrastruktur untuk mendorong transformasi digital kesehatan;</li> <li>3. Akuntabilitas alokasi anggaran pusat dan daerah untuk mendukung penguatan inovasi dan teknologi kesehatan;</li> <li>4. Kesiapan tenaga kesehatan untuk transformasi digital;</li> <li>5. Progres Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan;</li> <li>6. Permasalahan dan Hambatan Penguatan Inovasi;</li> <li>7. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi.</li> </ul>					
A.2.g	Akuntabilitas penanganan Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 menuju Endemi (Protokol Kesehatan maupun Vaksinasi Booster);</li> <li>2. Analisis Capaian dan Pemerataan Vaksinasi Reguler maupun Booster;</li> <li>3. Akuntabilitas dan Tata Kelola atas Ketersediaan Vaksin (mulai dari Pengadaan, Distribusi, dan Kedaluwarsa);</li> <li>4. Akuntabilitas Pengembangan Vaksin Covid-19 Dalam Negeri;</li> <li>5. Akuntabilitas Pembayaran Tunggakan Klaim RS dan Insentif Nakes;</li> <li>6. Permasalahan dan Hambatan Penanganan Covid-19;</li> <li>7. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi.</li> </ul>	D2	V			
A.2.h	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis ketepatan dan konvergensi Kebijakan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>;</li> <li>2. Analisis keselarasan kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar K/L/D;</li> <li>3. Implementasi Program Penurunan Program <i>Stunting</i>, meliputi:</li> </ul>	D2		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>a) Implementasi Pemenuhan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan dan konvergensi kebijakan intervensi spesifik dan sensitif;</li> <li>- Progress capaian dan ketepatan sasaran keluarga berisiko stunting;</li> <li>- Hambatan dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif;</li> <li>- Rekomendasi untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan;</li> </ul> <p>b) Ketersediaan Akses air minum dan sanitasi yang layak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan dan konvergensi kebijakan intervensi spesifik dan sensitif;</li> <li>- Progress capaian dan ketepatan sasaran keluarga berisiko stunting;</li> <li>- Hambatan dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif;</li> <li>- Rekomendasi untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan;</li> </ul> <p>c) Bantuan sosial pangan dan tunai bersyarat mendukung penurunan <i>stunting</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan dan konvergensi kebijakan intervensi spesifik dan sensitif;</li> <li>- Progress capaian dan ketepatan sasaran keluarga berisiko stunting;</li> <li>- Hambatan dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif;</li> <li>- Rekomendasi untuk mendorong keberhasilan</li> </ul>					

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
		pelaksanaan; 4. Analisis efektivitas program dalam penurunan prevalensi <i>stunting</i> .					
A.2.i	Skema Kesehatan Adaptif	1. Analisis desain kebijakan sistem kesehatan yang adaptif. 2. Kesiapan cadangan tenaga kesehatan untuk menghadapi <i>external shocks</i> ; 3. Standarisasi kemampuan tenaga kesehatan dalam sistem kesehatan yang adaptif; 4. Sarpras untuk mobilisasi nakes dan logistik dalam menghadapi <i>external shocks</i> ; 5. Permasalahan dan Hambatan Sistem Kesehatan Adaptif; 6. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan/Implementasi.	D2		V		
A.3	Kesejahteraan Sosial	1. Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah) untuk sektor perlindungan sosial serta prioritas penggunaannya; 2. Kualitas dan validitas data sosial ekonomi dan penerima bansos; 3. Analisis ketepatan program kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan masyarakat miskin; 4. Analisis efektivitas bauran kebijakan perlindungan sosial untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (indikator pengeluaran per kapita); 5. Analisis efektivitas kebijakan program pengentasan kemiskinan ekstrem.	D2			V	
A.3.a	Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi	1. Analisis atas kebijakan dan desain pengembangan regsossek;	D2	V		V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
	(Regsosek)	2. Analisis keterkaitan maupun integrasi data regsosek dengan DTKS; 3. Progres capaian pelaksanaan registrasi sosial ekonomi; 4. Akuntabilitas dan tata kelola pengembangan regsosek (data awal, pengumpulan data, pemeringkatan, pemutakhiran dan pemanfaatannya; 5. Tata kelola kelembagaan pengelolaan Regsosek; 6. Kesiapan infrastruktur sistem dan sarana prasarana Regsosek; 7. Interoperabilitas Data Regsosek untuk integrasi pelayanan melalui pusat data nasional; 8. Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program; 9. Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program.					
A.3.b	Bauran Program Kesejahteraan Sosial	1. Bauran Program Kesejahteraan Sosial meliputi Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial, meliputi: a) Ketepatan dan kecukupan grand design kesejahteraan sosial; b) Konvergensi kebijakan atas perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial pada tiap level ekonomi; c) Kesesuaian dan keselarasan kebijakan antar K/L dan pemda; d) Sinkronisasi ruang lingkup, pengembangan skema integrasi dan keterjangkauan program; e) Akuntabilitas dan tata kelola atas pelaksanaan program; f) Analisis efektivitas program kesejahteraan sosial; g) Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program;	D2	V	V	V	V

SEKTOR/TEMA/TOPIK 1	INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK 2	Rendai	TRIWULAN			
		PJ 3	I 4	II 5	III 6	IV 7
	<p>h) Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program;</p> <p>2. Penguatan rujukan terpadu, meliputi:</p> <p>a) Ketepatan desain dan kebijakan rujukan terpadu;</p> <p>b) Kondisi atas sarana prasarana dan sebaran pelayanan rujukan terpadu;</p> <p>c) Akuntabilitas atas pelaksanaan program;</p> <p>d) Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program;</p> <p>e) Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program.</p> <p>3. Fokus pada Perlindungan Sosial (dilakukan setiap Triwulan), meliputi:</p> <p>a) Ketepatan dan konvergensi desain program perlindungan sosial;</p> <p>b) Kesesuaian dan keselarasan kebijakan antar K/L dan penda;</p> <p>c) Ketepatan program perlindungan sosial dengan tingkat kemiskinan masyarakat;</p> <p>d) Keterjangkauan dan kecukupan nilai bantuan program perlindungan sosial;</p> <p>e) Burden sharing program perlindungan sosial antara pemerintah pusat dan daerah;</p> <p>f) Pengembangan graduasi penerima program perlindungan sosial;</p> <p>g) Perubahan perilaku penerima program perlindungan sosial;</p> <p>h) Analisis efektivitas program perlindungan sosial;</p> <p>i) Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program;</p> <p>j) Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program.</p>					

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
A.3.c	Penguatan Platform Penyaluran s.d. Pemanfaatan Bantuan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis atas kebijakan pemilihan penyedia layanan maupun instrumen untuk penyaluran s.d. pemanfaatan bantuan sosial;</li> <li>2. Analisis atas kesiapan sarana dan prasarana pendukung penyaluran bantuan;</li> <li>3. Akuntabilitas dan Tata kelola proses pendaftaran penerima bantuan, penyaluran bantuan (transfer dana) dan pemanfaatan bantuan;</li> <li>4. Analisis atas efektivitas, efisiensi dan ketepatan platform penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial;</li> <li>5. Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program;</li> <li>6. Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program.</li> </ol>	D2				V
A.3.d	Implementasi Bansos APBD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis ketepatan kebijakan tata kelola bantuan sosial APBD;</li> <li>2. Analisis keakuratan pendataan penerima bantuan;</li> <li>3. Analisis ketepatan perencanaan dan penganggaran dalam APBD;</li> <li>4. Analisis ketepatan penyaluran bantuan;</li> <li>5. Analisis efektivitas program bantuan sosial;</li> <li>6. Analisis peran pemerintah daerah dalam burden sharing program perlindungan sosial;</li> <li>7. Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program;</li> <li>8. Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program.</li> </ol>	D3				V
A.3.e	Implementasi Bansos APBDesa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis ketepatan kebijakan tata kelola bantuan sosial APBDesa;</li> <li>2. Analisis keakuratan pendataan penerima bantuan;</li> <li>3. Analisis ketepatan perencanaan dan penganggaran dalam APBDesa;</li> <li>4. Analisis ketepatan penyaluran bantuan;</li> </ol>	D3				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal	TRIWULAN				
1		2	PJ	I	II	III	IV	
			3	4	5	6	7	
		5. Analisis efektivitas program bantuan sosial; 6. Analisis peran pemerintah desa dalam <i>burden sharing</i> program perlindungan sosial; 7. Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program; 8. Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program.						
A.3.f	Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	1. Analisis ketepatan design kebijakan program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem; 2. Keselarasan dan kesesuaian program antar K/L/D; 3. Gambaran sebaran kemiskinan ekstrem di wilayah Indonesia; 4. Tata kelola basis data masyarakat miskin ekstrem; 5. Akuntabilitas dan tata kelola kelembagaan program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem; 6. Implementasi pelaksanaan program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem; 7. Analisis mekanisme mekanisme graduasi masyarakat miskin ekstrem; 8. Analisis efektivitas program pengentasa kemiskinan ekstrem; 9. Permasalahan/hambatan atas pelaksanaan program; 10. Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program.	D2				V	
A.3.g	Pengembangan Perlindungan Sosial Adaptif	1. Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif meliputi: a) Analisis atas ketepatan dan desain kebijakan skema perlindungan sosial adaptif yang dikembangkan; b) Gambaran kemampuan dan kecukupan jangkauan skema perlinsos adaptif yang dikembangkan dalam merespon <i>external shock</i> (kejadian bencana dan perubahan iklim);	D2				V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Analisis atas kesiapan platform penyaluran bantuan sosial adaptif;</li> <li>d) Analisis atas mekanisme pendataan penerima bantuan sosial adaptif;</li> <li>e) Mekanisme asesmen berkala atas perluasan jangkauan maupun penebalan bantuan skema perlinsos adaptif;</li> <li>f) Analisis atas kemampuan skema perlinsos adaptif dalam membangun ketahanan Penerima Manfaat terhadap Bencana dan perubahan iklim;</li> </ul> <p>2. Inovasi Pendanaan Perlindungan Sosial Adaptif meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analisis atas ketepatan desain dan kebijakan Inovasi Skema Pendanaan;</li> <li>b) Tata kelola dan akuntabilitas proses identifikasi dan pengembangan potensi serta pengelolaan sumber pendanaan baru bagi program perlinsos;</li> <li>c) Analisis atas kemampuan skema inovasi pendanaan baru dalam memperkuat komplementaritas pelaksanaan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Sosial;</li> <li>d) Tata kelola dan akuntabilitas pemanfaatan inovasi skema pendanaan;</li> <li>e) Risiko implementasi inovasi skema pendanaan Perlindungan Sosial;</li> <li>f) Permasalahan/hambatan dan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program.</li> </ul>						
B	Percepatan Penyelesaian	1. Analisis kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah	D1				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendat	TRIWULAN			
			PJ	I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>pusat dalam penguatan infrastruktur dan konektivitas;</li> <li>2. Potret penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas;</li> <li>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja;</li> <li>4. Analisis dampak pembangunan infrastruktur dan konektivitas;</li> <li>5. Permasalahan/hambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas;</li> <li>6. Gambaran inefisiensi;</li> <li>7. Modus kecurangan dan rekomendasi mitigasinya;</li> <li>8. Rekomendasi penguatan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas.</li> </ul>					
B.1	Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar (PSN & Non PSN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran dan analisis atas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di Indonesia;</li> <li>2. Simpulan keselarasan rancangan dan implementasi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan dukungannya termasuk simpulan evaluasi perencanaan lintas sektoral program;</li> <li>3. Simpulan tata kelola dan manajemen risiko program;</li> <li>4. Simpulan efektivitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam mendorong pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.</li> </ul>	D1		V		V
B.1.a	Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan dan ketepatan kebijakan dan grand design yang mendukung Pembangunan Perumahan Rakyat termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah;</li> <li>2. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan perumahan rakyat (pusat dan daerah);</li> <li>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja termasuk</li> </ul>	D1		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal	TRIWULAN			
1		2	RJ	I	II	III	IV
			3	4	5	6	7
		<p>operasionalisasi/utilisasi infrastruktur yang telah dibangun serta analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas dan administrasi;</p> <p>4. Analisis efektivitas program pembangunan perumahan rakyat;</p> <p>5. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan;</p> <p>6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program;</p> <p>7. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.</p>					
B.1.b	Infrastruktur SPAM	<p>1. Kecukupan dan ketepatan kebijakan dan <i>grand design</i> yang mendukung pembangunan infrastruktur SPAM termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah;</p> <p>2. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur SPAM (pusat dan daerah);</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja termasuk operasionalisasi/utilisasi infrastruktur yang telah dibangun, serta analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas dan administrasi;</p> <p>4. Analisis efektivitas program pembangunan infrastruktur SPAM;</p> <p>5. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan;</p> <p>6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program;</p>	D1		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal	TRIWULAN				
1		2	PJ	I	II	III	IV	
			3	4	5	6	7	
		7. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.						
B.1.c	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan dan ketepatan kebijakan dan <i>grand design</i> yang mendukung pembangunan infrastruktur SPAL termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah;</li> <li>2. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur SPAL (pusat dan daerah);</li> <li>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja termasuk operasionalisasi/utilisasi infrastruktur yang telah dibangun serta analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas dan administrasi;</li> <li>4. Analisis efektivitas program pembangunan infrastruktur SPAL;</li> <li>5. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan;</li> <li>6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program;</li> <li>7. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.</li> </ol>	D1		V		V	
B.2	Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Mobilitas (PSN & Non PSN)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran Penguatan infrastruktur konektivitas dan mobilitas;</li> <li>2. Simpulan keselarasan antara rancangan dan implementasi pembangunan infrastruktur konektivitas dan mobilitas dengan infrastruktur dukungannya;</li> <li>3. Gambaran tata kelola infrastruktur konektivitas dan mobilitas nasional;</li> <li>4. <i>Sustainability</i> pembiayaan pembangunan infrastruktur;</li> </ol>	D1		V		V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal	TRIWULAN			
			PJ	I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		<p>5. Potensi inefisiensi belanja sehubungan dengan kelemahan tata kelola program;</p> <p>6. Simpulan efektivitas pembangunan infrastruktur konektivitas dan mobilitas dalam mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan regional.</p>					
B.2.a	Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>1. Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam mendukung infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah;</p> <p>2. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan Jalan dan Jembatan (pusat dan daerah);</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan jalan dan jembatan, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi;</p> <p>4. Kestinambungan dan keselarasan pembangunan jalan dan jembatan (jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) termasuk integrasi dalam mendukung konektivitas lainnya seperti bandara, dan pelabuhan;</p> <p>5. Efektivitas pembangunan jalan dan jembatan secara nasional serta pada daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan) dalam mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru;</p> <p>6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program;</p> <p>7. Analisis risiko <i>fraud</i>;</p>	D1		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendai PJ	TRIWULAN			
1	2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7	
		8. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.					
B.2.b	Infrastruktur Jalan Tol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam mendukung infrastruktur jalan tol termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah;</li> <li>2. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan jalan tol (pusat dan daerah);</li> <li>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan jalan tol, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi;</li> <li>4. Utilisasi dan dampak infrastruktur jalan tol sesuai peruntukan;</li> <li>5. Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (<i>going concern</i>) perusahaan jalan tol (termasuk kewajaran harga/tarif);</li> <li>6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program;</li> <li>7. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.</li> </ol>	D1		V		V
B.2.c	Pembangunan Infrastruktur Kereta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam mendukung infrastruktur Kereta termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah;</li> <li>2. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur kereta termasuk prasarana perkeretapian (pusat dan daerah);</li> <li>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i)</li> </ol>	D1		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
1		2		I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>progres capaian pembangunan, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi;</p> <p>4. Potret Konektivitas Infrastruktur pendukung (jalur kereta terintegrasi antar daerah, aksesibilitas jalan, jalan tol, sentra ekonomi);</p> <p>5. Utilisasi infrastruktur kereta sesuai peruntukan (penumpang dan logistik);</p> <p>6. Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (<i>going concern</i>) perusahaan kereta (termasuk kewajaran harga/tarif);</p> <p>7. Efektivitas pembangunan infrastruktur kereta termasuk simpulan dampak pada sistem angkutan umum massal perkotaan pada kota metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar);</p> <p>8. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program;</p> <p>9. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan / percepatan implementasi.</p>					
B.2.d	Pembangunan Bandara	<p>1. Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam mendukung pembangunan bandara termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah;</p> <p>2. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan bandara (pusat dan daerah);</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan bandara, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan</p>	D1		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendat PJ	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1		2	3	4	5	6	7
		administrasi; 4. Konektivitas Infrastruktur pendukung (aksesibilitas Jalan, jalan tol, kereta); 5. Utilisasi dan dampak pembangunan bandara sesuai peruntukan, termasuk peran Jembatan Udara terhadap layanan transportasi /logistik wilayah 3TP; 6. Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (going concern) perusahaan jalan bandara (termasuk kewajaran harga/tarif); 7. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program; 8. Analisis risiko <i>fraud</i> ; 9. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.					
B.2.e	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	1. Ketepatan dan kecukupan kebijakan dalam mendukung pembangunan infrastruktur pelabuhan termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah; 2. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur pelabuhan (pusat dan daerah); 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi; 4. Potret konektivitas Infrastruktur pendukung (aksesibilitas jalan, jalan tol, sentra ekonomi); 5. Utilisasi dan dampak pembangunan infrastruktur pelabuhan sesuai peruntukan (mendukung tol laut);	D1		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
				I 4	II 5	III 6	IV 7
1		2					
		<p>6. Kelayakan, tata kelola, efisiensi dan keberlanjutan (<i>going concern</i>) perusahaan pelabuhan (termasuk kewajaran harga/tarif);</p> <p>7. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program;</p> <p>8. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.</p>					
B.3	Penguatan Infrastruktur informasi dan Komunikasi (PSN & Non PSN)	<p>1. Gambaran dan analisis pemanfaatan dan tata kelola informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;</p> <p>2. Potret aksesibilitas internet dan komunikasi antar wilayah;</p> <p>3. Analisis atas rancangan/peta jalan pemerataan akses Informasi dan Komunikasi (termasuk kecukupan upaya pemerataan akses Informasi dan Komunikasi pada daerah 3T);</p> <p>4. Analisis efektivitas pembangunan infrastruktur Informasi dan Komunikasi yang telah berjalan (eksisting);</p> <p>5. Simpulan progres dan efektivitas pembangunan PDN dan SDI dalam mendorong pemerintahan yang baik</p>	D2		V		V
B.3.a	Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi	<p>1. Potret (ketimpangan) akses internet dan komunikasi antar wilayah;</p> <p>2. Analisis atas kecukupan dan keselarasan kebijakan dan rancangan/peta jalan pemerataan akses internet dan komunikasi;</p> <p>3. Ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pemerataan infrastruktur akses</p>	D2		V		V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
		<p>Teknologi Informasi dan Komunikasi;</p> <p>4. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pemerataan dan penyediaan infrastruktur, akses internet dan komunikasi, dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi;</p> <p>5. Analisis progres dan efektivitas pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendorong peningkatan pemerataan akses internet dan komunikasi;</p> <p>6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program;</p> <p>7. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.</p>					
B.3.b	Penyediaan Infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN)	<p>1. Analisis kecukupan dan keselarasan kebijakan penyediaan PDN dalam rangka pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</p> <p>2. Analisis ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi penyediaan PDN;</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian penyediaan PDN dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi;</p> <p>4. Efektivitas penyediaan PDN;</p> <p>5. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program;</p> <p>6. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/percepatan implementasi.</p>	D2	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
1	2			I 4	II 5	III 6	IV 7
B.3.c	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kecukupan kebijakan dalam pembangunan SDI untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;</li> <li>2. Analisis ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan SDI;</li> <li>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk: (i) progres capaian pembangunan SDI dan (ii) analisis ketepatan jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi;</li> <li>4. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program;</li> <li>5. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan /percepatan implementasi.</li> </ol>	D2	V			
B.4	Pembangunan dan Tata Kelola IKN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan dan keselarasan kebijakan serta grand design pembangunan IKN;</li> <li>2. Analisis ketepatan dan keselarasan perencanaan dan implementasi pembangunan IKN (untuk setiap K/L/P terkait);</li> <li>3. Potret pembentukan dan tata kelola Otorita IKN;</li> <li>4. Sustainability pembiayaan pembangunan IKN;</li> <li>5. Akuntabilitas keuangan dan kinerja IKN, termasuk progres perkembangan pembangunan IKN;</li> <li>6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk kelemahan dalam tata kelola program;</li> <li>7. Rekomendasi perbaikan kebijakan.</li> </ol>	D5	V	V	V	V
C	Akuntabilitas Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potret postur APBN/Daerah/Desa TA 2023;</li> </ol>	D1				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendel	TRIWULAN			
1	2		PJ	I	II	III	IV
			3	4	5	6	7
	Negara, Daerah dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Analisis alokasi prioritas dan efektivitas belanja pemerintah (pusat, daerah, desa) TA 2023;</li> <li>3. Permasalahan/hambatan utama dalam percepatan belanja dan pengadaan barang/jasa pemerintah (pusat/daerah/desa);</li> <li>4. Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan ketidakefisienan belanja;</li> <li>5. Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan tidak optimalnya pendapatan;</li> <li>6. Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan pembiayaan (pusat dan daerah);</li> <li>7. Potret kualitas tata kelola dan kinerja BUMN/BUMD/BLU/BLUD;</li> <li>8. Permasalahan/risiko utama yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja BUMN/BUMD/BLU/BLUD;</li> <li>9. Rekomendasi perbaikan kebijakan akuntabilitas keuangan negara/daerah/desa dan BUMN/BUMD/BLU/BLUD.</li> </ol>					
C.1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis postur dan realisasi APBN 2023;</li> <li>2. Simpulan disiplin belanja pemerintah;</li> <li>3. Implementasi konsolidasi fiskal;</li> <li>4. Analisis efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi;</li> <li>5. Simpulan kinerja pendapatan negara (dibandingkan dengan target dan potensi);</li> <li>6. Analisis efektivitas pembiayaan pemerintah (Pinjaman Luar Negeri, KPBU, SWF, SBN dan SBSN);</li> <li>7. Rekomendasi perbaikan kebijakan perencanaan,</li> </ol>	D1			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
		penganggaran, dan kualitas pelaksanaan APBN					
C.1.a	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran K/L	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potret tindak lanjut peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran;</li> <li>2. Potensi efektivitas dari sisi perencanaan dan penganggaran;</li> <li>3. Potensi efisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran;</li> <li>4. Potensi ketercapaian tujuan pada sektor pangan dan energi;</li> <li>5. Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran;</li> <li>6. Rekomendasi perbaikan.</li> </ol>	D1	V			
C.1.b	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat	<p>Triwulan I meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postur belanja negara (analisis tren berdasarkan jenis belanja, prioritas sektoral, dan alokasi belanja K/L);</li> <li>2. Progres upaya konsolidasi fiskal;</li> <li>3. Akuntabilitas pembentukan asumsi makro APBN;</li> <li>4. Rencana penarikan dana dan proyeksi serapan belanja per triwulan tahun 2023;</li> <li>5. Potret rencana PBJ K/L Tahun 2023;</li> <li>6. Realisasi belanja dan PBJ (analisis capaian dibandingkan target s.d. triwulan berjalan dan pagu);</li> <li>7. Hambatan terkait realisasi belanja dan PBJ;</li> <li>8. Rekomendasi perbaikan</li> </ol> <p>Triwulan II dan III meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan waktu serapan belanja per triwulan II dan III dengan RPD;</li> </ol>	D1	V	V	V	V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendai PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>2. Potret penyesuaian RPD triwulan berjalan dengan RPD awal;</p> <p>3. Realisasi belanja dan PBJ (analisis capaian dibandingkan target s.d. triwulan berjalan dan pagu);</p> <p>4. Hambatan terkait realisasi belanja dan PBJ;</p> <p>5. <i>Spending review</i> sektoral (analisis atas efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program/kegiatan sektor tertentu);</p> <p>6. Analisis <i>foresight</i> dan keterkaitannya dengan isu-isu ekonomi;</p> <p>7. <i>Outlook</i> penyerapan/realisasi belanja;</p> <p>8. Rekomendasi perbaikan.</p> <p>Triwulan IV meliputi:</p> <p>1. Realisasi belanja (analisis capaian dibandingkan target s.d. triwulan berjalan dan pagu; tren realisasi per jenis belanja dan sektoral);</p> <p>2. Realisasi PBJ (analisis capaian dibandingkan rencana, dan analisis berdasarkan progres tahapan pengadaan);</p> <p>3. Kontribusi belanja terhadap perekonomian nasional;</p> <p>4. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi belanja APBN dan PBJ K/L.</p>					
C.1.c	Optimalisasi Pendapatan Negara (Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, serta PNBK)	<p>1. Potret kebijakan pendapatan negara (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan);</p> <p>2. Ketepatan penetapan target pendapatan negara dibandingkan potensinya;</p> <p>3. Potret tren pendapatan negara (analisis kontribusi per</p>	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
		<p>jenis pendapatan dan sektoral);</p> <p>4. Capaian realisasi pendapatan negara dibandingkan target;</p> <p>5. Identifikasi hambatan dalam pengumpulan pendapatan negara, termasuk hambatan regulasi;</p> <p>6. Tata kelola basis data objek pendapatan negara (integrasi dengan basis data lain, kemutakhiran data, dan efektivitas pemanfaatan basis data dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran);</p> <p>7. Efektivitas reformasi administrasi perpajakan, termasuk progres implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan turunannya;</p> <p>8. Potret pengembangan <i>national logistic ecosystem</i> (NLE) dan Indonesia <i>National Single Window</i> (INSW), antara lain; mencakup progres, kendala implementasi, dan dampak penerapan terhadap efisiensi waktu dan biaya;</p> <p>9. Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi.</p>					
C.1.d	<p>Optimalisasi Pembiayaan Inovatif (Pinjaman Luar Negeri, Kerjasama Pemerintah dan badan Usaha (KPBU), <i>Sovereign Wealth Funds</i> (SWF), Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))</p>	<p>1. Potret pembiayaan anggaran dan komposisi utang pemerintah (analisis tren, potret, kebutuhan, dan pemenuhan pembiayaan);</p> <p>2. Profil risiko utang pemerintah (identifikasi risiko dan efektivitas mitigasinya);</p> <p>3. Optimalisasi skema pembiayaan, meliputi:</p> <p>a) Optimalisasi Skema KPBU (Fokus pada Jaringan Gas, Bandar Udara, dan Pelabuhan), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potret kebijakan dan tata kelola KPBU (ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan);</li> <li>- Gambaran perkembangan implelementasi KPBU;</li> <li>- Analisis financial sustainability dan financial</li> </ul>	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendat PJ 3	TRIWULAN			
				I 4	II 5	III 6	IV 7
1		2	3	4	5	6	7
		<p>feasibility atas proyek KPBU;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis optimalisasi pemanfaatan KPBU (perbandingan antara realisasi implementasi KPBU dengan sebaran potensi proyek yang dapat dibiayai dengan KPBU);</li> <li>- Identifikasi hambatan penyelenggaraan;</li> <li>- Rekomendasi percepatan dan optimalisasi KPBU;</li> </ul> <p>b) Optimalisasi SWF dalam Pembiayaan Infrastruktur, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potret progres pengembangan SWF;</li> <li>- Analisis kebijakan dan keselarasan pembiayaan infrastruktur dengan SWF;</li> <li>- Peta peluang dan potensi kerja sama investasi infrastruktur melalui SWF;</li> <li>- Identifikasi risiko kecurangan pembiayaan insfrastruktur dengan SWF;</li> <li>- Kinerja pembiayaan SWF;</li> <li>- Identifikasi hambatan;</li> <li>- Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi;</li> </ul> <p>c) Optimalisasi Pemanfaatan Pembiayaan SBN dan SBSN, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potret kebijakan terkait SBN dan SBSN (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan)</li> <li>- Potret pembiayaan melalui SBN dan SBSN (proporsi terhadap total pembiayaan; analisis ketepatan penghitungan kebutuhan dan realisasi pemenuhannya);</li> <li>- Efektivitas pemanfaatan SBSN;</li> </ul>					

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendat PJ	TRIWULAN				
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi hambatan;</li> <li>- Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</li> </ul> <p>d) Optimalisasi Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potret kebijakan dan tata kelola pengelolaan pinjaman luar negeri;</li> <li>- Potret Pinjaman Luar Negeri (analisis tren, portofolio dan pengelolaan risiko);</li> <li>- Akuntabilitas pemanfaatan pinjaman luar negeri, termasuk efisiensi biaya pinjaman;</li> <li>- Efektivitas pemanfaatan pinjaman luar negeri;</li> <li>- Ruang optimalisasi pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk kebutuhan produktif;</li> <li>- Identifikasi hambatan;</li> <li>- Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</li> </ul>						
C.1.e	Akuntabilitas Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rangka Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kualitas kebijakan dan tata kelola DSP;</li> <li>2. Potret DSP (sebaran, kecukupan alokasi, dan tren pemanfaatan);</li> <li>3. Identifikasi risiko pengelolaan DSP, termasuk risiko kecurangan;</li> <li>4. Akuntabilitas pengelolaan DSP;</li> <li>5. Rekomendasi perbaikan tata kelola DSP;</li> <li>6. Analisis akuntabilitas dan efektivitas DSP (fokus pada penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Potret data sebaran kebakaran hutan dan lahan;</li> <li>b) Analisis desain kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan;</li> </ol> </li> </ol>	D2			V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Analisis kesesuaian perencanaan, penganggaran, pencapaian kegiatan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;</li> <li>d) Analisis akuntabilitas DSP dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;</li> <li>e) Rekomendasi perbaikan tata kelola penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.</li> </ul>					
C.2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis postur dan realisasi APBD 2023 (analisis regional dan sektoral);</li> <li>2. Simpulan disiplin belanja pemerintah daerah;</li> <li>3. Analisis efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi daerah;</li> <li>4. Analisis efektivitas pembiayaan daerah;</li> <li>5. Analisis kualitas desain dan efektivitas implementasi manajemen risiko terkait pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>6. Simpulan kinerja PAD (dibandingkan dengan target dan potensi);</li> <li>7. Rekomendasi perbaikan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan kualitas pelaksanaan APBD.</li> </ol>	D3			V	
C.2.a	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potret tindak lanjut peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran;</li> <li>2. Potensi Efektivitas dari sisi perencanaan dan penganggaran;</li> <li>3. Potensi Efisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran;</li> <li>4. Potensi ketercapaian tujuan pada sektor tertentu pariwisata dan pangan;</li> </ol>	D3	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		5. Efektivitas desain dan implementasi manajemen risiko terkait proses perencanaan dan penganggaran; 6. Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran; 7. Rekomendasi atas perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran.					
C.2.b	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Triwulan I meliputi: 1. Postur belanja daerah (analisis tren berdasarkan jenis belanja dan prioritas alokasi belanja daerah); 2. Analisis kemandirian fiskal; 3. Analisis dukungan alokasi keuangan daerah untuk pengendalian inflasi daerah; 4. Analisis anggaran kas/cash disbursement plan dan proyeksi serapan belanja per triwulan tahun 2023; 5. Potret rencana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) daerah 2023; 6. Analisis capaian realisasi belanja dan PBJ; 7. Analisis hambatan penyerapan belanja dan PBJ; 8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.  Triwulan II meliputi: 1. Ketepatan waktu serapan belanja triwulan II dengan proyeksi; 2. Realisasi belanja dan PBJ (analisis capaian dibandingkan target s.d. triwulan berjalan dan pagu); 3. Hambatan terkait realisasi belanja dan PBJ; 4. Spending review sektor pertanian dan perikanan (efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program/kegiatan); 5. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.	D3	V	V	V	V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>Triwulan III meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan waktu serapan belanja triwulan II dengan proyeksi;</li> <li>2. Realisasi belanja dan PBJ (analisis capaian dibandingkan target s.d. triwulan berjalan dan pagu);</li> <li>3. Hambatan terkait realisasi belanja dan PBJ;</li> <li>4. Spending review sektor UMKM (efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program/kegiatan);</li> <li>5. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</li> </ol> <p>Triwulan IV meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi belanja (analisis capaian dibandingkan target s.d. triwulan berjalan dan pagu; tren realisasi per jenis belanja dan sektoral);</li> <li>2. Realisasi PBJ (analisis capaian dibandingkan rencana, dan analisis berdasarkan progres tahapan pengadaan);</li> <li>3. Spending review sektor pariwisata (efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program/kegiatan);</li> <li>4. Rekomendasi perbaikan pelaksanaan belanja dan PBJ Daerah.</li> </ol>					
C.2.c	Optimalisasi PAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potret kebijakan dan tata kelola PAD (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan), termasuk progres implementasi UU HKPD;</li> <li>2. Ketepatan penetapan target PAD dibandingkan potensinya;</li> <li>3. Potret tren capaian realisasi PAD (analisis kontribusi per jenis pendapatan dan sektoral);</li> <li>4. Capaian realisasi PAD dibandingkan target;</li> </ol>	D3		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		5. Analisis pengelolaan basis data objek PAD, termasuk keterhubungan dengan basis data lainnya; 6. Pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD; 7. Efektivitas desain dan implementasi manajemen risiko terkait pengelolaan PAD; 8. Identifikasi hambatan dalam pengumpulan PAD, termasuk hambatan regulasi; 9. Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi.					
C.2.d	Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah	1. Potret kebijakan dan tata kelola pembiayaan daerah (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan); 2. Potret pembiayaan daerah dan komposisi utang pemerintah daerah (analisis potret, kebutuhan, dan realisasi pemenuhan pembiayaan); 3. Capaian realisasi pembiayaan daerah dibandingkan target; 4. Identifikasi hambatan dalam pembiayaan daerah, termasuk hambatan regulasi; 5. Efektivitas pemanfaatan pembiayaan daerah; 6. Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi.	D3		V		
C.2.e	Efektivitas Transfer ke Daerah	1. Analisis kebijakan pengalokasian dan ketepatan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum, Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan; 2. Akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan DAU bidang Pekerjaan Umum, DBH bidang migas dan DAK bidang Jalan oleh pemda; 3. Efektivitas desain dan implementasi manajemen risiko terkait penggunaan DAU bidang Pekerjaan Umum,	D3			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendai PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		DBH bidang migas dan DAK bidang Jalan oleh pemda; 4. Identifikasi permasalahan/hambatan; 5. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.					
C.2.f	Efektivitas Dana Otonomi Khusus	1. Potret kebijakan pemerintah daerah terkait Dana Otsus (analisis keselarasan, ketepatan, dan kecukupan kebijakan); 2. Analisis ketepatan penyaluran serta ketepatan sasaran dalam penggunaan Dana Otsus; 3. Potret prioritas pemanfaatan Dana Otsus; 4. Kecukupan dan ketepatan kebijakan percepatan pembangunan daerah otonomi khusus; 5. Akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Otsus-Aceh, Papua Barat dan Papua; 6. Progres percepatan pembangunan di daerah otonomi khusus; 7. Identifikasi permasalahan/hambatan; 8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.	D5		V		
C.2.g	Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	1. Kebijakan dan tata kelola pengendalian inflasi daerah (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan); 2. Potret dan konvergensi prioritas upaya daerah (program, kegiatan, dan belanja) dalam mengendalikan inflasi; 3. Efektivitas pelaksanaan pengendalian inflasi daerah; 4. Analisis hambatan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah; 5. Rekomendasi perbaikan atas pengendalian inflasi daerah.	D3	V	V	V	V
C.3	Akuntabilitas	1. Analisis desain dan bauran kebijakan terkait desa	D3			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa	(perencanaan, tata kelola keuangan, dan aset desa); 2. Analisis efektivitas keuangan desa; 3. Analisis efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan aset desa; 4. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.					
C.3.a	Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	1. Analisis desain dan bauran kebijakan perencanaan dan penganggaran desa; 2. Akuntabilitas pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, meliputi: a. Keselarasan prioritas perencanaan dan penganggaran dana di desa dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat; b. Keselarasan antar dokumen perencanaan di desa; c. Keselarasan perencanaan pembangunan desa dengan program pemerintah pusat dan daerah; 3. Analisis dukungan perencanaan desa terhadap capaian Indeks Desa Membangun dan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> Desa; 4. Analisis keberlanjutan perencanaan pembangunan desa; 5. Keterkaitan perencanaan desa terhadap hasil yang diharapkan (kebutuhan masyarakat).	D3	V			
C.3.b	Akuntabilitas Keuangan Desa	Triwulan I meliputi: a. Potret kebijakan dan tata kelola Pengelolaan Keuangan Desa (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan); b. Analisis postur APBDesa (analisis tren berdasarkan belanja per bidang dan potret sebaran sektor prioritas desa);	D3	V	V	V	V

SEKTOR/TEMA/TOPIK 1	INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK 2	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
			I 4	II 5	III 6	IV 7
	<p>c. Potret penggunaan dana desa untuk mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa;</p> <p>d. Analisis capaian realisasi belanja desa dan hambatannya;</p> <p>e. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p> <p>Triwulan II meliputi:</p> <p>a. Analisis capaian realisasi belanja dan pendapatan desa;</p> <p>b. Potret permasalahan pengelolaan keuangan desa (pemanfaatan, efisiensi, dan potensi kecurangan);</p> <p>c. Analisis efektivitas kegiatan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa (fokus pada PKTD dan penyaluran dana bergulir masyarakat);</p> <p>d. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p> <p>Triwulan III meliputi:</p> <p>a. Analisis capaian realisasi belanja dan pendapatan desa;</p> <p>b. Potret permasalahan pengelolaan keuangan desa (pemanfaatan, efisiensi, dan potensi kecurangan);</p> <p>c. Analisis efektivitas Belanja Desa terhadap peningkatan sektor unggulan desa;</p> <p>d. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p> <p>Triwulan IV meliputi:</p> <p>a. Analisis capaian realisasi belanja dan pendapatan desa;</p> <p>b. Potret permasalahan pengelolaan keuangan desa</p>					

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendat PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		(pemanfaatan, efisiensi, dan potensi kecurangan); c. Analisis efektivitas belanja desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; d. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.					
C.3.c	Akuntabilitas Aset Desa	1. Potret kebijakan dan tata kelola aset desa (analisis ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan); 2. Potret pengelolaan aset desa (perencanaan, pengadaan, pencatatan dan pelaporan, serta pengamanan Aset Desa); 3. Analisis efektivitas pemanfaatan Aset Desa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dan peningkatan PADes.	D3		V		
C.4	Akuntabilitas Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan	1. Simpulan atas akuntabilitas dan kualitas tata kelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD; 2. Simpulan atas kontribusi BUMN/BUM/BLU/BLUD bagi pembangunan nasional/pemenuhan kebutuhan masyarakat	D4		V		
C.4.a	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	1. Kualitas <i>Governance, Risk and Control</i> BUMN; 2. Analisis kinerja keuangan, operasional dan fiskal BUMN; 3. Analisis atas tingkat kompetitif, efisiensi, dan transparansi BUMN (fokus pada cluster pangan, energi, pariwisata); 4. Kontribusi BUMN terhadap pembangunan (kinerja pelaksanaan penugasan pemerintah); 5. Peran BUMN pada kontribusi fiskal negara/daerah; 6. Akuntabilitas keuangan dan pemanfaatan aset; 7. Efektivitas implementasi kebijakan holding di BUMN; 8. Potret implementasi <i>Environmental, Social, &amp;</i>	D4		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal	TRIWULAN			
1		2	PJ	I	II	III	IV
			3	4	5	6	7
		<p><i>Governance (ESG)</i> pada BUMN (reporting);</p> <p>9. Permasalahan dan hambatan BUMN dalam pelaksanaan bisnis;</p> <p>10. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi;</p> <p>11. Identifikasi risiko, termasuk risiko kecurangan.</p>					
C.4.b	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Fokus pada BU Jasa Air dan BUMD Aneka Usaha)	<p>1. Kualitas <i>Governance, Risk and Control</i>, termasuk progres tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tata kelola;</p> <p>2. Analisis kinerja keuangan, operasional, <i>going concern</i> usaha;</p> <p>3. Analisis efektivitas pelaksanaan pengelolaan BUMD;</p> <p>4. Peran BUMD terkait kontribusi fiskal daerah;</p> <p>5. Permasalahan dan hambatan BUMD dalam pelaksanaan bisnis;</p> <p>6. Identifikasi risiko, termasuk risiko kecurangan;</p> <p>7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi;</p> <p>8. Khusus Badan Usaha Jasa Air: Analisis kontribusi/kinerja Badan Usaha Jasa Air dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.</p>	D4		V		
C.4.c	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	<p>1. Kualitas <i>Governance, Risk and Control</i>, termasuk progres perbaikan (Tindak Lanjut Rekomendasi);</p> <p>2. Analisis kinerja keuangan, operasional, <i>going concern</i> usaha;</p> <p>3. Analisis efektivitas pelaksanaan pengelolaan BUMD;</p> <p>4. Peran BUMD terkait kontribusi fiskal daerah;</p> <p>5. Analisis kontribusi/kinerja Badan Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;</p> <p>6. Analisis kontribusi/kinerja BPD dalam menyalurkan</p>	D4		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat;</p> <p>7. Permasalahan dan hambatan BUMD dalam pelaksanaan bisnis;</p> <p>8. Identifikasi risiko, termasuk risiko kecurangan;</p> <p>9. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>					
C.4.d	Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D) (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	<p>1. Analisis Tata Kelola BLU/D;</p> <p>2. Akuntabilitas kinerja keuangan dan operasional BLU/D;</p> <p>3. Permasalahan dan hambatan BLU/D dalam mendukung program pemerintah/pemberian layanan;</p> <p>4. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi;</p> <p>5. Identifikasi risiko, termasuk risiko kecurangan.</p>	D4		V		
D	Pembangunan Ekonomi	<p>1. Simpulan kecukupan, ketepatan, keselarasan kebijakan peningkatan/penguatan ekonomi nasional dan daerah;</p> <p>2. Analisis efektifitas implementasi program peningkatan ekspor, pengendalian impor, dan peningkatan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi;</p> <p>3. Analisis efektifitas pengembangan industri dalam negeri dan pemberdayaan UMKM dalam mendorong kedaulatan ekonomi;</p> <p>4. Analisis transformasi struktur ekonomi nasional;</p> <p>5. Analisis daya saing ekonomi global;</p> <p>6. Identifikasi hambatan dan permasalahan strategis terkait peningkatan/penguatan ekonomi;</p> <p>7. Rekomendasi kebijakan strategis untuk peningkatan/penguatan ekonomi.</p>	D1				V
D.1	Neraca Perdagangan	1. Analisis ketepatan dan keselarasan kebijakan ekspor-	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I	II	III	IV
				4	5	6	7
		<p>impor nasional;</p> <p>2. Analisis dampak efektivitas kerjasama ekonomi/perdagangan internasional terhadap peningkatan ekspor dan pengurangan impor;</p> <p>3. Analisis kontribusi ekspor-impor terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>					
D.1.a	Peningkatan Ekspor	<p>1. Analisis kecukupan dan ketepatan bauran kebijakan peningkatan ekspor nasional;</p> <p>2. Analisis efektivitas koordinasi kelembagaan lintas sektoral terkait peningkatan ekspor nasional;</p> <p>3. Potret akuntabilitas dan kinerja implementasi program peningkatan ekspor nasional;</p> <p>4. Analisis strategi potensi dan pengembangan <i>export center</i>;</p> <p>5. Analisis daya saing dan nilai tambah ekspor dengan fokus pada sektor industri pengolahan;</p> <p>6. Analisis kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Bruto;</p> <p>7. Hambatan dan permasalahan peningkatan ekspor nasional;</p> <p>8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>	D1		V		
D.1.b	Pengendalian Impor	<p>1. Analisis kecukupan dan ketepatan baruan kebijakan pengendalian (larangan dan batasan) impor;</p> <p>2. Analisis efektivitas kelembagaan koordinasi lintas sektoral terkait pengendalian impor;</p> <p>3. Efektivitas implementasi program pengendalian impor (misalnya: tata niaga impor, <i>trade remedies</i>, pemberlakuan SNI, BMTP, BMAT);</p> <p>4. Inventarisasi kapasitas industri dalam pemenuhan</p>	D1		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		kebutuhan komoditas dalam negeri; 5. Hambatan dan permasalahan pengendalian impor; 6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.					
D.1.c	Kerjasama Ekonomi/Perdagangan Internasional (Bilateral dan Multilateral)	1. Analisis regulasi dan kebijakan kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional; 2. Identifikasi dan analisis dokumen kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional; 3. Analisis efektivitas dan akuntabilitas tata kelola kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional; 4. Analisis dampak kerjasama internasional terhadap peningkatan investasi dan daya saing ekonomi nasional; 5. Hambatan dan permasalahan implementasi kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional; 6. Rekomendasi kebijakan strategis.	D2		V		
D.2	Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	1. Konvergensi program pemberdayaan UMKM dalam skema pengembangan industri nasional dalam mendorong produktivitas dan daya saing UMKM; 2. Analisis efektifitas bantuan permodalan dan fasilitas pembiayaan/insentif pajak secara kolektif terhadap produktivitas dan daya saing UMKM; 3. Potret kontribusi sektor UMKM terhadap indikator pertumbuhan ekonomi (PDB, penyerapan tenaga kerja, dsb.)	D1	V			
D.2.a	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	1. Konvergensi dan keselarasan kebijakan dan kelembagaan pemberdayaan UMKM; 2. Konsolidasi/integrasi basis data tunggal UMKM nasional dan daerah; 3. Analisis efektivitas program peningkatan produktivitas	D1	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendat	TRIWULAN			
1		2	PJ	I	II	III	IV
			3	4	5	6	7
		<p>dan daya saing UMKM meliputi:</p> <p>a) Produktivitas UMKM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran dan sebaran program fasilitasi bahan baku penolong, bantuan peralatan/mesin, dsb;</li> <li>- Akuntabilitas keuangan dan kinerja program peningkatan produktivitas UMKM;</li> <li>- Analisis efektivitas program peningkatan produktivitas UMKM;</li> </ul> <p>b) Daya Saing UMKM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran dan sebaran program entrepreneurship coaching clinic, branding/packaging, sertifikasi, promosi/kemitraan/informasi pasar;</li> <li>- Akuntabilitas keuangan dan kinerja program peningkatan daya saing UMKM;</li> <li>- Analisis efektivitas program peningkatan daya saing UMKM;</li> </ul> <p>4. Hambatan dan permasalahan peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM;</p> <p>5. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>					
D.2.b	Akses Permodalan UMKM	<p>1. Analisis kecukupan dan ketepatan bauran kebijakan bantuan/akses permodalan UMKM pemerintah (Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro, dsb.);</p> <p>2. Akuntabilitas penyaluran bantuan/akses permodalan UMKM pemerintah (termasuk ketepatan sasaran, jumlah, waktu, administrasi);</p> <p>3. Identifikasi sebaran program bantuan/akses permodalan UMKM non-pemerintah (<i>Corporate Social Responsibility/CSR BUMN</i>);</p> <p>4. Analisis dampak bantuan/akses permodalan UMKM</p>	D1	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendat PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		(pemerintah dan non-pemerintah) terhadap pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan UMKM; 5. Hambatan dan permasalahan bantuan/akses permodalan UMKM; 6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.					
D.2.c	Insentif Pajak UMKM	1. Analisis ketepatan dan kesesuaian kebijakan dan implementasi insentif pajak; 2. Akuntabilitas penyaluran (termasuk ketepatan sasaran, jumlah, waktu, administrasi); 3. Analisis efektivitas insentif pajak terhadap pengembangan usaha; 4. Hambatan dan permasalahan pemberian insentif pajak; 5. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.	D1	V			
D.3	Peningkatan Arus Masuk Investasi dan Penguatan Industri Dalam Negeri	1. Analisis kondisi existing industri dalam negeri dalam perspektif pohon industri; 2. Analisis kemandirian produk dalam negeri dalam pasar Pengadaan Barang Jasa pemerintah; 3. Percepatan substitusi impor dan analisis keselarasan skema pengembangan industri nasional dan daerah; 4. Analisis peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional sebagai bagian dari rantai pasok global ( <i>global supply chain</i> ); 5. Analisis pengembangan industri nasional dalam konteks sustainability dan konservasi lingkungan hidup.	D1			V	
D.3.a	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	1. Analisis kepatuhan implementasi kebijakan dan kelembagaan P3DN; 2. Analisis ketepatan kebijakan dan kepatuhan TKDN;	D5	V	V	V	V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>3. Potret alokasi dan realisasi P3DN pada pasar PBJ K/L/D meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Validasi rencana umum pengadaan dan ketepatan alokasi belanja pengadaan barang/jasa K/L/D;</li> <li>- Analisis tren realisasi belanja (kontrak) PBJ.</li> </ul> <p>4. Efektivitas penggunaan e-katalog (nasional, sektoral, lokal);</p> <p>5. Potret akuntabilitas dan kinerja program penciptaan substitusi impor;</p> <p>6. Hambatan dan permasalahan pengendalian P3DN;</p> <p>7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>					
D.3.b	Kemudahan Perizinan Berusaha	<p>1. Analisis kecukupan dan ketepatan bauran kebijakan kemudahan perizinan berusaha di pusat dan daerah;</p> <p>2. Analisis efektivitas koordinasi kelembagaan lintas sektoral terkait kemudahan perizinan berusaha di pusat dan daerah;</p> <p>3. Analisis tata kelola <i>Online single submission</i> (OSS) dalam mendukung kemudahan perizinan berusaha;</p> <p>4. Analisis dampak kemudahan perizinan berusaha terhadap perbaikan Indeks Kemudahan Berusaha serta peningkatan investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing);</p> <p>5. Hambatan dan permasalahan implementasi OSS;</p> <p>6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>	D1			V	
D.3.c	Hilirisasi Industri	<p>1. Analisis roadmap dan kebijakan hilirisasi industri nasional;</p> <p>2. Analisis sektor prioritas hilirisasi industri nasional;</p> <p>3. Analisis kinerja smelter Sumber Daya Alam (mineral) terhadap produktivitas dan nilai tambah komoditas;</p>	D1			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
1	2			I 4	II 5	III 6	IV 7
		4. Permasalahan dan hambatan hilirisasi industri dalam negeri; 5. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.					
D.3.d	Tata Kelola Industri Tambang, meliputi: - Batubara (TW1) - Timah (TW2) - Bauksit (TW3) - Nikel (TW4)	1. Gambaran umum industri tambang nasional (jumlah produksi, sumber produksi (BUMN, Swasta, Impor), termasuk gambaran ketergantungan impor); 2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan kebijakan dukungan industri tambang nasional; 3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan dukungan industri tambang nasional; 4. Analisis penetapan harga komoditas tambang nasional (analisis biaya produksi); 5. Analisis potensi inefisiensi industri tambang (termasuk produktivitas pabrik); 6. Permasalahan dan hambatan terkait efisiensi industri tambang nasional; 7. Simpulan efisiensi industri tambang nasional; 8. Risiko yang belum termitigasi; 9. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.	D5	V	V	V	V
D.3.e	Insentif Pajak dan Kepabeanan Korporasi	1. Analisis ketepatan dan kesesuaian kebijakan dan implementasi insentif pajak dan kepabeanan; 2. Akuntabilitas penyaluran (termasuk ketepatan sasaran, jumlah, waktu, administrasi); 3. Analisis efektivitas insentif pajak dan kepabeanan terhadap pengembangan industri; 4. Hambatan dan permasalahan pemberian insentif pajak dan kepabeanan; 5. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.	D1			V	
D.3.f	Pengembangan	1. Analisis kebijakan dan kelembagaan pembangunan	D1			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendat PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I	II	III	IV
				4	5	6	7
	Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri (KEK/KI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. KEK/KI, termasuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan KEK/KI;</li> <li>2. Analisis grand design (strategi) pengembangan KEK/KI;</li> <li>3. Akuntabilitas keuangan dan capaian progres pembangunan KEK/KI;</li> <li>4. Analisis efektivitas pengembangan KEK/KI terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dsb);</li> <li>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan pengembangan KEK/KI;</li> <li>6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</li> </ul>					
D.4	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konvergensi kebijakan dan program lintas sektoral pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata pusat dan daerah;</li> <li>2. Dampak pengembangan kawasan pariwisata terhadap penguatan ekonomi (PDRB, devisa, investasi, dsb.);</li> <li>3. Analisis daya saing pariwisata nasional di level internasional.</li> </ul>	D1	V			
D.4.a	Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis strategi (<i>roadmap/grand design</i>) pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata;</li> <li>2. Analisis kecukupan dan ketepatan penetapan program dan pendanaan (penganggaran) program pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata;</li> <li>3. Analisis akuntabilitas implementasi program pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata;</li> <li>4. Dampak pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata terhadap kunjungan wisatawan (domestik dan internasional);</li> <li>5. Permasalahan dan hambatan pengembangan</li> </ul>	D1	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
		infrastruktur pariwisata; 6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.					
D.4.b	Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)	1. Analisis keselarasan perencanaan/desain pembangunan infrastruktur destinasi pariwisata di pusat dan daerah; 2. Analisis kecukupan aksesibilitas/amenitas kawasan pariwisata (jalan, jembatan, hunian, dsb); 3. Akuntabilitas keuangan dan progres capaian pembangunan kawasan pariwisata; 4. Permasalahan dan hambatan pembangunan infrastruktur pariwisata; 5. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.	D1	V			
D.4.c	Dukungan Pengembangan Pariwisata	1. Analisis program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif di kawasan pariwisata; 2. Analisis efektifitas program promosi dan pemasaran pariwisata; 3. Analisis implementasi green tourism di kawasan pariwisata; 4. Analisis kecukupan penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan pariwisata; 5. Permasalahan dan hambatan dukungan pengembangan pariwisata; 6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.	D1	V			
E	Ketahanan Pangan	1. Potret ketahanan pangan (antara lain mencakup gambaran pemenuhan kebutuhan pangan nasional, analisis regional, perkembangan diversifikasi pangan, kecukupan dan kelancaran distribusi pangan, dst.); 2. Analisis ketepatan kebijakan/grand design peningkatan	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>ketahanan pangan nasional, termasuk keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah;</p> <p>3. Analisis kesesuaian prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah (pusat dan daerah) dengan strategi peningkatan ketahanan pangan;</p> <p>4. Analisis efektivitas pelaksanaan program pemerintah dalam mendorong peningkatan ketahanan pangan.</p> <p>Pengawasan sektor ketahanan pangan dilaksanakan sekurang-kurangnya atas 13 komoditas pangan, yaitu: Beras, Terigu, Jagung, Kedelai, Cabe, Bawang, Minyak Goreng, Gula, Telur Ayam, Daging Ayam Ras, Daging Sapi, Ikan, Garam.</p>					
E.1	Peningkatan Produksi Pangan ( <i>On Farm</i> )	<p>1. Gambaran umum kebutuhan, produksi dan sebaran wilayah atas 13 komoditas pangan;</p> <p>2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan bauran kebijakan peningkatan produksi pangan;</p> <p>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan;</p> <p>4. Simpulan efektivitas peningkatan produksi dan produktivitas 13 komoditas pangan;</p> <p>5. Risiko yang belum termitigasi;</p> <p>6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>	D5			V	
E.1.a	Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional	<p>1. Gambaran umum pemanfaatan lahan pertanian (luas lahan, luas lahan produktif dan sebaran per wilayah);</p> <p>2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan kebijakan pemanfaatan lahan pertanian;</p> <p>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan;</p> <p>4. Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan</p>	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>antara pusat dan daerah;</p> <p>5. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program;</p> <p>6. Risiko yang belum termitigasi;</p> <p>7. Simpulan efektivitas pelaksanaan program;</p> <p>8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>					
E.1.b	Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul	<p>1. Gambaran umum kecukupan pemenuhan bibit dan benih nasional (kebutuhan, produksi, impor dan sebaran per wilayah);</p> <p>2. Analisis ketepatan dan sustainability rancangan kebijakan program bibit dan benih unggul;</p> <p>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan;</p> <p>4. Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah;</p> <p>5. Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi);</p> <p>6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program;</p> <p>7. Risiko yang belum termitigasi;</p> <p>8. Simpulan efektivitas pelaksanaan program;</p> <p>9. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>	D5			V	
E.1.c	Tata Kelola Pupuk Nasional	<p>1. Gambaran umum kecukupan pemenuhan pupuk nasional (kebutuhan, produksi, surplus/defisit, ekspor/impor dan sebaran per wilayah);</p> <p>2. Analisis ketepatan dan sustainability rancangan kebijakan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional;</p> <p>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan pupuk nasional;</p> <p>4. Tata kelola distribusi pupuk nasional (termasuk</p>	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
		<p>ketersediaan dan keterjangkauan per wilayah);</p> <p>5. Ketepatan penetapan alokasi pupuk bersubsidi;</p> <p>6. Ketepatan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi (ketepatan sasaran, waktu, dan jumlah serta mekanisme pengawasan);</p> <p>7. Risiko yang belum termitigasi;</p> <p>8. Simpulan efektivitas kebijakan pemenuhan pupuk nasional terhadap produktivitas pangan;</p> <p>9. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>					
E.1.d	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	<p>1. Gambaran umum kecukupan pemenuhan pakan ternak nasional (kebutuhan, produksi, impor dan sebaran per wilayah);</p> <p>2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan kebijakan produksi pakan ternak;</p> <p>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan;</p> <p>4. Analisis keterjangkauan harga pakan ternak dan permasalahannya;</p> <p>5. Keselarasan rancangan dan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah;</p> <p>6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan kebijakan pemenuhan kebutuhan pakan;</p> <p>7. Risiko yang belum termitigasi;</p> <p>8. Simpulan efektivitas produksi pakan terhadap kebutuhan pakan;</p> <p>9. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>	D5			V	
E.1.e	Peningkatan Infrastruktur Pangan Nasional	<p>1. Gambaran alokasi belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pangan;</p> <p>2. Potret sebaran dan kondisi infrastruktur pangan</p>	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
1		2		I 4	II 5	III 6	IV 7
		<p>(analisis regional);</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan progres kinerja pembangunan infrastruktur pangan (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi);</p> <p>4. Analisis efektivitas pembangunan infrastruktur pangan dalam mendorong peningkatan produksi pangan;</p> <p>5. Hambatan dan permasalahan dalam pembangunan infrastruktur pangan;</p> <p>6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>					
E.1.f	Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan	<p>1. Gambaran umum kecukupan dukungan peralatan produksi pangan (kebutuhan dan penyaluran);</p> <p>2. Analisis ketepatan dan sustainability rancangan bauran kebijakan dukungan peralatan produksi pangan;</p> <p>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan;</p> <p>4. Analisis pemanfaatan teknologi pangan dalam dukungan peralatan produksi pangan;</p> <p>5. Akuntabilitas keuangan dan kinerja (termasuk ketepatan sasaran, waktu, kualitas, jenis, dan administrasi);</p> <p>6. Tata kelola penyaluran solar bersubsidi (bagi nelayan);</p> <p>7. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program;</p> <p>8. Risiko yang belum termitigasi;</p> <p>9. Analisis efektivitas kebijakan dukungan peralatan produksi pangan dalam meningkatkan produksi pangan;</p> <p>10. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal Pj 3	TRIWULAN			
			I 4	II 5	III 6	IV 7
1	2					
E.1.g	Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Nelayan	D5			V	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan kelembagaan petani dan nelayan (termasuk akses permodalan, penyuluh pertanian, koperasi, kelompok tani dan nelayan, bantuan sosial, dst.);</li> <li>2. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan;</li> <li>3. Analisis efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kelembagaan petani dan nelayan;</li> <li>4. Analisis efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani;</li> <li>5. Permasalahan dan hambatan;</li> <li>6. Risiko yang belum termitigasi;</li> <li>7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</li> </ol>					
E.1.h	Penanggulangan Hama dan Penyakit	D5			V	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan penanggulangan hama dan penyakit;</li> <li>2. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan;</li> <li>3. Simpulan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam penanggulangan hama dan penyakit;</li> <li>4. Permasalahan dan hambatan;</li> <li>5. Risiko yang belum termitigasi;</li> <li>6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</li> </ol>					
E.2	Keterjangkauan dan Ketersediaan Pangan ( <i>Off Farm</i> )	D5			V	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran umum ketersediaan, stabilitas harga dan sebaran wilayah atas 13 komoditas pangan;</li> <li>2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan bauran kebijakan keterjangkauan dan ketersediaan pangan;</li> <li>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan</li> </ol>					

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		kebijakan; 4. Simpulan efektivitas ketersediaan dan stabilitas harga atas 13 komoditas pangan; 5. Risiko yang belum termitigasi; 6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.					
E.2.a	Penanganan Pasca Panen	1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dalam meningkatkan kemampuan penanganan pasca panen; 2. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan; 3. Analisis pemanfaatan teknologi pertanian dalam penanganan pasca panen; 4. Simpulan efektivitas bauran kebijakan penanganan pasca panen dalam meningkatkan kualitas hasil produksi pangan; 5. Permasalahan dan hambatan; 6. Risiko yang belum termitigasi; 7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.	D5			V	
E.2.b	Supply Chain Komoditas Pangan	1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan dalam memastikan kelancaran <i>supply chain</i> komoditas pangan (termasuk distribusi dan tata niaga); 2. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan; 3. Simpulan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam memastikan kelancaran <i>supply chain</i> komoditas pangan; 4. Analisis dampak panjang <i>supply chain</i> terhadap harga dan ketersediaan komoditas pangan; 5. Permasalahan dan hambatan; 6. Risiko yang belum termitigasi;	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal	TRIWULAN			
1		2	PJ	I	II	III	IV
			3	4	5	6	7
E.2.c	Kebijakan Stabilisasi Harga	<p>7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p> <p>1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan stabilisasi harga komoditas pangan;</p> <p>2. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan;</p> <p>3. Simpulan efektivitas bauran kebijakan stabilisasi harga komoditas pangan;</p> <p>4. Permasalahan dan hambatan;</p> <p>5. Risiko yang belum termitigasi;</p> <p>6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>	D5			V	
E.2.d	Kebijakan Ekspor/Impor Pangan	<p>1. Analisis ketepatan rancangan bauran kebijakan ekspor/impor komoditas pangan (kebutuhan, produksi, defisit/surplus, penetapan kuota, realisasi);</p> <p>2. Analisis kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan kebijakan;</p> <p>3. Simpulan efektivitas bauran kebijakan ekspor/impor dalam menjaga harga dan ketersediaan komoditas pangan;</p> <p>4. Permasalahan dan hambatan;</p> <p>5. Risiko yang belum termitigasi;</p> <p>6. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</p>	D5			V	
E.3	Resiliensi Cadangan Pangan Nasional	<p>1. Gambaran umum cadangan pangan dan sebaran wilayah atas 13 komoditas pangan;</p> <p>2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan bauran kebijakan cadangan pangan;</p> <p>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan;</p> <p>4. Analisis efektivitas kebijakan cadangan pangan dalam mendukung resiliensi cadangan pangan nasional;</p>	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Renda	TRIWULAN			
1		2	PJ	I	II	III	IV
			3	4	5	6	7
		5. Analisis efektivitas kebijakan kawasan sentra produksi pangan dalam mendukung resiliensi cadangan pangan nasional; 6. Analisis efisiensi industri pupuk dalam mendukung resiliensi produksi pangan nasional; 7. Risiko yang belum termitigasi; 8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.					
E.3.a	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat	1. Analisis ketepatan kebijakan pemenuhan cadangan pangan pemerintah pusat atas 13 komoditas; 2. Analisis ketepatan perencanaan kebutuhan cadangan pangan (termasuk basis data yang digunakan, keselarasan perkiraan dengan kebutuhan riil, dst.); 3. Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan cadangan pangan (termasuk pembelian, penyimpanan, distribusi); 4. Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas; 5. Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program; 6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program; 7. Risiko yang belum termitigasi; 8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.	D5			V	
E.3.b	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1. Analisis ketepatan kebijakan pemenuhan cadangan pangan pemerintah daerah atas 13 komoditas pangan; 2. Analisis ketepatan perencanaan kebutuhan cadangan pangan (termasuk basis data yang digunakan, keselarasan perkiraan dengan kebutuhan riil, dst.); 3. Akuntabilitas kinerja dan keuangan pengelolaan cadangan pangan daerah (termasuk pembelian, penyimpanan, distribusi);	D3			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I	II	III	IV
				4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Analisis kinerja pengelolaan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas harga komoditas;</li> <li>5. Simpulan atas efektivitas pelaksanaan program;</li> <li>6. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan program;</li> <li>7. Risiko yang belum termitigasi;</li> <li>8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</li> </ul>					
E.3.c	Peningkatan Kualitas, Keamanan, dan Diversifikasi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran umum kualitas, keamanan, dan diversifikasi pangan nasional;</li> <li>2. Analisis ketepatan kebijakan kualitas pangan dan keamanan pangan;</li> <li>3. Analisis ketepatan kebijakan diversifikasi pangan;</li> <li>4. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan;</li> <li>5. Analisis upaya standarisasi produk dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan;</li> <li>6. Analisis pelaksanaan diversifikasi pangan dalam mendukung ketahanan pangan;</li> <li>7. Permasalahan dan hambatan;</li> <li>8. Risiko yang belum termitigasi;</li> <li>9. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.</li> </ul>	D5			V	
E.3.d	Efisiensi Industri Pupuk Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran umum industri pupuk nasional (jumlah produksi, sumber produksi (BUMN, Swasta, Impor), dan jenis pupuk);</li> <li>2. Analisis ketepatan dan <i>sustainability</i> rancangan kebijakan dukungan industri pupuk nasional;</li> <li>3. Analisis kesesuaian implementasi dengan rancangan kebijakan dukungan industri pupuk nasional;</li> <li>4. Analisis penetapan harga pupuk nasional (analisis biaya produksi pupuk BUMN);</li> </ul>	D4			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
		5. Analisis potensi inefisiensi industri pupuk (termasuk produktivitas pabrik dan efektivitas subsidi/kompensasi bagi produsen pupuk); 6. Ketepatan penetapan harga pupuk bersubsidi (dihubungkan dengan analisis potensi inefisiensi industri); 7. Ketepatan perhitungan realisasi belanja subsidi dan pembayaran kompensasi terkait industri pupuk; 8. Permasalahan dan hambatan terkait efisiensi industri pupuk nasional; 9. Simpulan efisiensi industri pupuk nasional (termasuk ketepatan harga dan potensi produktivitas); 10. Risiko yang belum termitigasi; 11. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.					
E.3.e	<i>Food estate</i>	1. Analisis ketepatan kebijakan pengembangan <i>food estate (on-farm dan off-farm)</i> , serta keselarasan antar K/L dan Pemda; 2. Kualitas tata kelola lahan pangan untuk <i>food estate</i> (terkait dengan status lahan, pembagian lahan, dst); 3. Ketersediaan bibit dan pupuk yang sesuai dengan kondisi lahan; 4. Keselarasan kegiatan <i>food estate</i> dengan kegiatan dukungan (irigasi, waduk, bendungan, embung, sumur/pompa bor, jalan, saprodi, alsintan, dst.); 5. Progres penyelesaian pembangunan <i>food estate</i> ; 6. Pencapaian target produksi dan produktivitas pangan di kawasan <i>food estate</i> ; 7. Efektivitas sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah hasil produksi, distribusi dan pemasaran	D5		V	V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I 4	II 5	III 6	IV 7
		berbasis digital; 8. Efektivitas korporasi petani (berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani); 9. Hambatan dan permasalahan pelaksanaan <i>food estate</i> ; 10. Risiko pelaksanaan <i>food estate</i> yang belum termitigasi; 11. Simpulan atas efektivitas pelaksanaan <i>food estate</i> ; 12. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi <i>food estate</i> .					
E.3.f	Lambung Ikan Nasional	1. Analisis ketepatan kebijakan pengembangan lumbung perikanan nasional dan keselarasan antar K/L dan Pemda; 2. Gambaran progres capaian program lumbung ikan nasional; 3. Keselarasan kegiatan lumbung ikan nasional dengan kegiatan dukungan (kapal perikanan, alat penangkap ikan ramah lingkungan, infrastruktur pelabuhan perikanan, balai benih, dll); 4. Hambatan dan permasalahan pelaksanaan lumbung ikan nasional; 5. Risiko pelaksanaan lumbung ikan nasional yang belum termitigasi; 6. Simpulan atas efektivitas pelaksanaan lumbung ikan nasional; 7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.	D5		V		V
F	Ketahanan Energi	1. Simpulan ketahanan energi nasional (dikonstruksikan dari aspek ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan);	D5				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I	II	III	IV
				4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan Ketahanan Energi Nasional;</li> <li>3. Kepatuhan penyelesaian produk hukum turunan, baik di pusat maupun daerah;</li> <li>4. Keselarasan antar kebijakan, serta keselerasan antara pusat dan daerah;</li> <li>5. Kecukupan pemantauan, pengendalian, dan pemutakhiran kebijakan;</li> <li>6. Kecukupan kebijakan dan implementasi pengukuran kinerja ketahanan energi nasional;</li> <li>7. Identifikasi ruang perbaikan kebijakan penguatan ketahanan energi nasional.</li> </ul>					
F.1	Tata Kelola Kelembagaan dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Keselarasan antara kelembagaan dan pendanaan dengan kebijakan dan strategi penguatan ketahanan energi nasional;</li> <li>2. Efektivitas konstruksi kelembagaan dan pendanaan dalam mendukung penguatan ketahanan energi nasional;</li> <li>3. Identifikasi upaya penguatan tata kelola kelembagaan dan pendanaan</li> </ul>	D5	V			
F.1.a	Tata Kelola Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis konstruksi kelembagaan pengelolaan energi nasional;</li> <li>2. Analisis keutuhan kelembagaan;</li> <li>3. Analisis kejelasan dan kecukupan pembagian tanggung jawab pusat dan daerah, serta elemen kelembagaan lainnya;</li> <li>4. Kepatuhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aktor/elemen kelembagaan pengelolaan energi nasional;</li> </ul>	D5	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendai PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I	II	III	IV
				4	5	6	7
		5. Efektivitas penguatan kelembagaan sesuai Kebijakan Ekonomi Nasional; 6. Rekomendasi penguatan tata kelola kelembagaan.					
F.1.b	Tata Kelola Pendanaan	1. Analisis struktur pendanaan yang tersedia untuk penguatan ketahanan energi nasional; 2. Kepatuhan pemerintah pusat dan daerah dalam mengalokasikan dana pengembangan dan penguatan infrastruktur energi, serta akuntabilitas penggunaan dana tersebut; 3. Optimalisasi peran Badan Usaha dan Perbankan dalam penguatan pendanaan; 4. Efektivitas Penguatan pendanaan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur dan akses energi; 5. Analisis risiko fraud; 6. Rekomendasi peningkatan penguatan tata kelola pendanaan.	D5	V			
F.2	Ketersediaan Energi	1. Kecukupan, ketepatan, dan keselarasan kebijakan penyediaan energi 2. Analisis keseimbangan produksi, kebutuhan, dan impor energi (disertai proyeksi jangka menengah) 3. Analisis keterjaminan ( <i>security</i> ) pasokan energi dalam hal terjadi keterbatasan produksi dan atau impor energi.	D5		V		
F.2.a	Penyediaan Energi	1. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan mengenai penyediaan energi; 2. Akuntabilitas dan ketepatan perencanaan kebutuhan energi, serta perencanaan pemenuhan kebutuhan tersebut; 3. Efektivitas eksplorasi sumber daya energi, serta	D5		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal	TRIWULAN			
1		2	PJ	I	II	III	IV
			3	4	5	6	7
		<p>gambaran struktur sumber daya energi nasional terkini (termasuk energi fosil dan non-fosil);</p> <p>4. Capaian pemenuhan produksi energi terhadap kebutuhan (termasuk produksi energi fosil dan non-fosil);</p> <p>5. Analisis kecukupan kapasitas produksi energi terhadap perkiraan kebutuhan, serta proyeksi jangka menengah;</p> <p>6. Analisis optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya energi potensial dalam meningkatkan produksi energi nasional;</p> <p>7. Optimalisasi kerja sama internasional dalam penguatan penyediaan energi;</p> <p>8. Analisis rencana kontinjensi penyediaan energi dalam hal terjadi krisis atau kondisi darurat;</p> <p>9. Analisis risiko fraud;</p> <p>10. Rekomendasi peningkatan efektivitas penyediaan energi.</p>					
F.2.b	Pengendalian Ketergantungan Impor Energi	<p>1. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan terkait ekspor-impor energi;</p> <p>2. Capaian neraca ekspor-impor energi, serta analisis ketergantungan energi;</p> <p>3. Identifikasi penyebab ketergantungan impor energi;</p> <p>4. Identifikasi potensi produk pengganti impor energi, dan kebutuhan pengembangan industri domestik;</p> <p>5. Analisis risiko fraud;</p> <p>6. Rekomendasi efektivitas pengendalian ketergantungan impor energi.</p>	D5		V		
F.2.c	Tata Kelola Cadangan	<p>1. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan terkait</p>	D5		V		

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendel PJ 3	TRIWULAN			
1		2		I 4	II 5	III 6	IV 7
	Energi	<p>cadangan energi (mencakup Cadangan Penyangga Energi, Cadangan Strategis, dan Cadangan Operasional);</p> <p>2. Analisis distribusi tanggung jawab pembentukan cadangan energi;</p> <p>3. Kepatuhan/pemenuhan tanggung jawab pembentukan cadangan energi oleh aktor terkait;</p> <p>4. Kondisi cadangan energi terkini, serta analisis kecukupan cadangan energi tersebut;</p> <p>5. Rekomendasi penguatan tata kelola cadangan energi.</p>					
F.3	Akses Terhadap Energi	<p>1. Kecukupan, ketepatan dan keselarasan bauran kebijakan untuk mendukung kemudahan akses terhadap energi;</p> <p>2. Analisis keseimbangan antara laju peningkatan produksi dengan peningkatan pemerataan energi;</p> <p>3. Analisis dampak pemerataan/ketimpangan <i>supply</i> energi terhadap kondisi ekonomi wilayah;</p> <p>4. Identifikasi potensi upaya percepatan perluasan dan pemerataan akses energi</p>	D5			V	
F.3.a	Infrastruktur Energi (produksi dan distribusi)	<p>1. Analisis akuntabilitas dan ketepatan perencanaan pembangunan infrastruktur energi dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan;</p> <p>2. Analisis keselarasan rencana pembangunan infrastruktur pusat dan daerah;</p> <p>3. Kesesuaian antara implementasi dan rencana pembangunan infrastruktur energi;</p> <p>4. Capaian pembangunan infrastruktur (termasuk pemenuhan target pembangunan);</p>	D5			V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendai PJ 3	TRIWULAN			
1		2		I 4	II 5	III 6	IV 7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Akuntabilitas keuangan pembangunan infrastruktur energi;</li> <li>6. Efektivitas pembangunan infrastruktur energi sesuai peruntukan;</li> <li>7. Analisis risiko <i>fraud</i>;</li> <li>8. Rekomendasi perbaikan pembangunan infrastruktur energi</li> </ul>					
F.3.b	Distribusi dan Pemerataan Energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Potret kondisi pelayanan dan penyediaan energi untuk konsumen (masyarakat, industri, transportasi, dll);</li> <li>2. Analisis ketimpangan distribusi energi (mencakup perspektif ketersediaan stok, konsumsi/pemanfaatan dan harga) per wilayah;</li> <li>3. Analisis ketepatan distribusi lokasi pengembangan industri dengan potensi sumber daya energi;</li> <li>4. Analisis keandalan sistem/jaringan distribusi energi;</li> <li>5. Analisis risiko <i>fraud</i>;</li> <li>6. Rekomendasi perbaikan distribusi dan peningkatan pemerataan energi.</li> </ul>	D5			V	
F.4	Keterjangkauan Energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan, ketepatan dan keselarasan bauran kebijakan untuk menjaga keterjangkauan energi;</li> <li>2. Efektivitas dan kecukupan kolaborasi peran pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keterjangkauan energi, serta optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam mengurangi kesenjangan harga energi antara wilayah;</li> <li>3. Analisis keseimbangan upaya meningkatkan investasi dan efisiensi biaya produksi energi dengan beban subsidi pemerintah;</li> <li>4. Identifikasi potensi upaya peningkatan keterjangkauan</li> </ul>	D5	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendat PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I	II	III	IV
				4	5	6	7
F.4.a	Tata Kelola Investasi Sektor Energi	energi bagi masyarakat. 1. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan terkait investasi di pusat dan daerah (termasuk insentif); 2. Disiplin implementasi kebijakan dalam memudahkan investasi di bidang energi (termasuk perizinan di pusat dan daerah); 3. Potret proporsi investasi pemerintah dan swasta di bidang energi (termasuk proporsi kontribusi pemenuhan energi nasional); 4. Potret potensi, peluang dan tantangan investasi di bidang energi; 5. Rekomendasi penguatan tata kelola investasi sektor energi.	D5	V			
F.4.b	Akuntabilitas Pembentukan Harga Energi	1. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan penetapan harga energi; 2. Analisis kecukupan dan ketepatan jaminan pemenuhan komoditas domestik untuk kebutuhan produksi energi; 3. Analisis kewajaran pembentukan harga pokok produksi energi (termasuk analisis mengenai efisiensi industri); 4. Identifikasi komponen pembentuk harga energi yang dapat diefisienkan; 5. Potret kondisi stabilitas harga energi (termasuk analisis kewajaran fluktuasi harga energi); 6. Rekomendasi peningkatan akuntabilitas pembentukan harga energi.	D5	V			
F.4.c	Tata Kelola dan Akuntabilitas Subsidi Energi	1. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi sektor energi (termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah);	D5	V			

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendat PJ	TRIWULAN			
1		2	3	I	II	III	IV
				4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Akuntabilitas dan ketepatan formula perhitungan subsidi energi;</li> <li>3. Analisis sustainabilitas fiskal belanja subsidi pemerintah (termasuk analisis tren fluktuasi beban subsidi);</li> <li>4. Analisis ketepatan sasaran subsidi;</li> <li>5. Identifikasi area kebijakan dan/atau implementasi subsidi energi yang dapat diefisienkan;</li> <li>6. Rekomendasi penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas subsidi energi.</li> </ul>					
F.5	Transformasi Energi Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan, ketepatan dan keselarasan bauran kebijakan terkait kesiapan menuju transformasi energi hijau;</li> <li>2. Potret capaian Bauran Energi Primer serta keseimbangan proporsi capaian EBT dengan laju pengurangan porsi cadangan terbukti energi fosil;</li> <li>3. Identifikasi upaya percepatan yang diperlukan menuju transformasi energi hijau.</li> </ul>	D1				V
F.5.a	Transisi Menuju Energi Baru Terbarukan (EBT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis ketepatan dan kecukupan kebijakan transisi menuju energi hijau (termasuk kebijakan mengenai Bauran Energi Primer);</li> <li>2. Potret ketercapaian pemenuhan Bauran Energi Primer;</li> <li>3. Hambatan terkait pemenuhan Bauran Energi Primer;</li> <li>4. Analisis keseimbangan antara laju pengurangan cadangan terbukti energi fosil dengan rencana pengembangan energi pengganti;</li> <li>5. Kepatuhan implementasi kebijakan transisi menuju energi hijau;</li> <li>6. Identifikasi hambatan utama transisi energi fosil ke</li> </ul>	D1				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendai PJ	TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	
		energi baru terbarukan (termasuk dampak perkembangan geopolitik terkini); 7. Rekomendasi percepatan transisi menuju EBT.					
F.5.b	Konservasi Energi dan Sumber Daya Energi	1. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan konservasi energi di pusat dan daerah; 2. Analisis ketepatan kebijakan pemanfaatan sumber daya energi (pusat dan daerah); 3. Kepatuhan dan efektivitas implementasi konservasi energi; 4. Kepatuhan dan efektivitas implementasi diversifikasi energi dalam rangka konservasi sumber daya energi dan ketahanan energi nasional; 5. Potret kepatuhan perlindungan lingkungan hidup dalam pengembangan energi nasional; 6. Rekomendasi perbaikan terkait konservasi dan pemanfaatan Sumber Daya Energi.	D1				V
F.5.c	Investasi dan Riset Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan investasi dan riset bidang energi di pusat dan daerah; 2. Akuntabilitas dan Efektivitas pelaksanaan fasilitasi/insentif investasi di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT); 3. Identifikasi area penguatan fasilitasi/insentif investasi di bidang EBT; 4. Akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana riset di bidang EBT; 5. Potret implementasi dan pemanfaatan hasil riset bidang EBT; 6. Rekomendasi penguatan riset dan penguatan pemanfaatan riset bidang EBT.	D1				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendat	TRIWULAN			
1		2	PJ	I	II	III	IV
			3	4	5	6	7
G	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan dan hambatan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>2. Analisis keberlanjutan penguatan tata kelola pemerintahan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih;</li> <li>3. Akuntabilitas dan tata kelola persiapan penyelenggaraan pemilu sebagai basis keberlanjutan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.</li> </ol>	D3				V
G.1	Penguatan Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protret kualitas tata kelola K/L/D;</li> <li>2. Efektivitas Tata Kelola dalam mendukung tujuan pembangunan nasional (berdasarkan Simpulan penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari sisi SPIP/MRI, Pengelolaan Strategis Nasional, APIP, Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan);</li> <li>3. Area perbaikan penguatan tata kelola pemerintahan.</li> </ol>	D3				V
G.1.a	Maturitas SPIP/MRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran kualitas pelaksanaan SPIP/MR (kebijakan, kelembagaan, identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko);</li> <li>2. Analisis efektivitas penyelenggaraan SPIP/MRI terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;</li> <li>3. Identifikasi hambatan penyelenggaran SPIP/MR;</li> <li>4. <i>Best practice</i> penyelenggaran SPIP/MR pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;</li> <li>5. Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP/MR Pemerintah Pusat dan Daerah.</li> </ol>	D3				V
G.1.b	Pengelolaan risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran kualitas pelaksanaan pengelolaan risiko</li> </ol>	D3	V	V	V	V

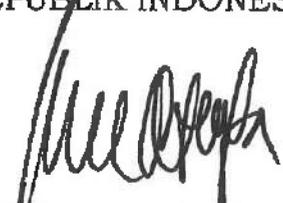
SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendat PJ	TRIWULAN			
1	2	3	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	
	sektor strategis nasional	<p>pada sektor strategis nasional (identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko);</p> <p>2. Analisis efektivitas penyelenggaraan pengelolaan risiko terhadap ketercapaian tujuan sektor strategis nasional (termasuk simpulan potensi ketercapaian target sektor strategis nasional);</p> <p>3. Identifikasi hambatan penyelenggaraan pengelolaan risiko;</p> <p>4. <i>Best practice</i> penyelenggaraan pengelolaan risiko pada sektor strategis nasional;</p> <p>5. Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan risiko pada sektor strategis nasional.</p>					
G.1.c	Kapabilitas APIP	<p>1. Analisis kondisi kapabilitas aparat pengawas internal pada Kemenetrian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (K/L/D/BU);</p> <p>2. Analisis upaya peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pada K/L/D/BU;</p> <p>3. Efektivitas peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pada K/L/D/BU dalam peningkatan kualitas tata kelola;</p> <p>4. Analisis hambatan pelaksanaan upaya peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pada K/L/D/BU;</p> <p>5. <i>Best practice</i> tata kelola aparat pengawas internal pada K/L/D/BU;</p> <p>6. Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah perbaikan kebijakan.</p>	D3			V	
G.1.e	Pengendalian	1. Kualitas penerapan pengendalian kecurangan oleh	D5	V		V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal PJ 3	TRIWULAN			
1		2		I 4	II 5	III 6	IV 7
	Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	<p>K/L/D/BU meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil risiko kecurangan tematik;</li> <li>- Profil risiko HKP Tematik;</li> </ul> <p>2. Rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pengendalian kecurangan (lesson learned dari pencegahan, deteksi dan respon kecurangan);</p> <p>3. Rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian HKP</p>					
G.2	Reforma Agraria	<p>1. Gambaran permasalahan tata ruang wilayah dalam mendukung pembangunan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis permasalahan penyediaan lahan guna pembangunan;</li> <li>- Analisis umum permasalahan konflik pertanahan;</li> <li>- Analisis umum permasalahan pelayanan administrasi pertanahan dan lainnya;</li> </ul> <p>2. Potret capaian dan sebaran redistribusi lahan dan legalisasi aset;</p> <p>3. Analisis keseimbangan peruntukan objek redistribusi tanah untuk pertanian dan non pertanian;</p> <p>4. Analisis kualitas kebijakan reforma agraria;</p> <p>5. Analisis kualitas bauran kebijakan tata ruang dan wilayah;</p> <p>6. Analisis implementasi kebijakan reforma agraria dan kebijakan tata ruang dan wilayah;</p> <p>7. Analisis risiko <i>fraud</i>;</p> <p>8. Rekomendasi perbaikan permasalahan tata ruang, konflik agraria dan percepatan pelayanan pertanahan;</p> <p>9. Efektivitas kebijakan penataan struktur agraria dalam penyelesaian permasalahan pertanahan.</p>	D5	V			
G.3	Persiapan dan	1. Simpulan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu	D2				V

SEKTOR/TEMA/TOPIK		INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK	Rendal	TRIWULAN				
1		2	PJ	I	II	III	IV	
			3	4	5	6	7	
	Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada	<p>dan Pilkada 2024;</p> <p>2. Area perbaikan untuk keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024;</p> <p>3. Rekomendasi mitigasi risiko pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.</p>						
G.2.a	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	<p>1. Akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Pemilu dan Pilkada;</p> <p>2. Disiplin pengelolaan dana penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada (termasuk dana hibah);</p> <p>3. Analisis risiko fraud;</p> <p>4. Identifikasi hambatan belanja penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.</p>	D2	V				
G.2.b	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	<p>1. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa untuk Pemilu dan Pilkada;</p> <p>2. Efektivitas dan efisiensi distribusi logistik Pemilu dan Pilkada;</p> <p>3. Kepatuhan P3DN pada pengadaan barang dan jasa Pemilu dan Pilkada;</p> <p>4. Kualitas proses pemutakhiran Data Pemilih Tetap;</p> <p>5. Identifikasi hambatan pengadaan barang dan jasa dan pemutakhiran DPT;</p> <p>6. Identifikasi risiko pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan penetapan DPT;</p> <p>7. Analisis risiko <i>fraud</i>.</p>	D5		V			
G.2.c	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan	<p>1. Efektivitas pengelolaan risiko penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada (termasuk risiko siber);</p> <p>2. Akuntabilitas pengamanan dan pengawasan Pemilu dan Pilkada;</p> <p>3. Delivery peran lembaga pengawas penyelenggaraan</p>	D2				V	

SEKTOR/TEMA/TOPIK 1	INFORMASI HASIL PENGAWASAN SEKTOR/TEMA/TOPIK 2	Renda PJ 3	TRIWULAN			
			I 4	II 5	III 6	IV 7
	Pemilu dan Pilkada, termasuk peran Pemerintah Daerah; 4. Identifikasi hambatan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada; 5. Analisis risiko fraud					

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
MUHAMMAD YUSUF ATEH

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR PR.01/KEP-538/K/SU/2022

TENTANG

AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN

DAN AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN

DAERAH TAHUN 2023

## AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH TAHUN 2023

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN MOBILITAS</b>							
1	Program Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Guna Mengatasi Kesenjangan Antar Wilayah	<p>1. Analisis keselarasan kebijakan pengembangan infrastruktur transportasi laut dengan kebijakan di tingkat nasional, dan kecukupan kebijakan mengatasi permasalahan pengembangan infrastruktur laut serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan;</p> <p>2. Analisis ketepatan program/kegiatan serta dukungan anggaran dalam mengatasi isu/permasalahan pengembangan infrastruktur transportasi laut di Provinsi Sulawesi Selatan;</p>	D.1.3	SULAWESI SELATAN		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Analisis keberadaan Kelembagaan, Pedoman Tata Kelola, SOP pengembangan infrastruktur transportasi laut di Provinsi Sulawesi Selatan, standarisasi layanan dan implementasinya;</li> <li>4. Analisis tingkat penyerapan anggaran dan ketercapaian target kinerja pengembangan infrastruktur transportasi laut di Provinsi Sulawesi Selatan;</li> <li>5. Analisis pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana pengembangan infrastruktur transportasi laut di Provinsi Sulawesi Selatan;</li> <li>6. Analisis proyeksi keberlangsungan infrastruktur transportasi laut (<i>going concern</i>);</li> <li>7. Analisis Dampak pengembangan infrastruktur transportasi laut pada perbaikan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan pembangunan;</li> <li>8. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan.</li> </ul>						
2	Program Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar Sebagai HUB PORT (HEART OF THREE OCEAN PACIFIC-SOUTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis keselarasan dan kecukupan kebijakan Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037;</li> <li>2. Analisis efektivitas penunjukan PT Persero Batam sebagai pelaksana Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar;</li> <li>3. Analisis Tata Kelola dan Manajemen Risiko</li> </ul>	D.1.3	KEPULAUAN RIAU	V			

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	CHINA-INDIAN OCEAN)	<p>dalam pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar;</p> <p>4. Akuntabilitas keuangan dan capaian target pembangunan Pelabuhan Batu Ampar;</p> <p>5. Analisis pembangunan Pelabuhan Batu Ampar dalam memberikan kontribusi PDRB;</p> <p>6. Analisis proses Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar dalam menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kota Batam.</p>						
3	Program Penataan Pelabuhan Dalam Rangka Penguatan Konektivitas Kawasan	<p>1. Analisis kebijakan dan kelembagaan penataan dan pengelolaan pelabuhan;</p> <p>2. Analisis kesiapan dan dukungan infrastruktur pendukung pelabuhan;</p> <p>3. Capaian progres penataan dan pengelolaan pelabuhan;</p> <p>4. Analisis dampak penataan dan pengelolaan pelabuhan terhadap konektivitas kawasan, perbaikan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang serta peningkatan manfaat ekonomi;</p> <p>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan;</p> <p>6. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>	D.1.3	BANGKA BELITUNG	V			
4	Program Integrasi Transportasi untuk Daerah Tertinggal untuk mengatasi Disparitas Harga	<p>1. Analisis ketepatan dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan subsidi ongkos angkut di Provinsi Kalimantan Utara;</p> <p>2. Akuntabilitas, tata kelola, keberlanjutan, dan ketepatan program/kegiatan telah memadai</p>	D.1.3	KALIMANTAN UTARA			V	

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>dalam rangka pengembangan konektivitas;</p> <p>3. Analisis pengaruh penerapan kebijakan SOA terhadap dampak kebermanfaatn bagi masyarakat;</p> <p>4. Analisis pengaruh penerapan kebijakan SOA terhadap peningkatan PDRB/perekonomian daerah pada kawasan 3T;</p> <p>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan;</p> <p>6. Rekomendasi strategis kepada para pemangku kepentingan terkait.</p>						
<b>II</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>							
1	Program Lumbung Pangan Nasional	<p>1. Analisis Keselarasan Kebijakan Peningkatan Produksi Pangan untuk mewujudkan Sumatera Utara sebagai lumbung padi nasional dengan Kebijakan Nasional;</p> <p>2. Analisis Kebijakan untuk mencukupi/mengatasi isu/permasalahan Peningkatan Produksi Pangan untuk mewujudkan Sumatera Utara sebagai lumbung padi nasional;</p> <p>3. Analisis ketepatan program/kegiatan serta dukungan anggaran dalam mengatasi isu/permasalahan;</p> <p>4. Analisis keberadaan SOP perwujudan Sumatera Utara sebagai lumbung padi nasional serta Implementasinya;</p> <p>5. Analisis Pemaantauan Berkelanjutan oleh</p>	D.1.2	SUMATERA UTARA			V	

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>APIP;</p> <p>6. Analisis Penyerapan anggaran dan ketercapaian target kinerja program/kegiatan;</p> <p>7. Analisis Dampak pelaksanaan program terhadap peningkatan produksi pertanian;</p> <p>8. Analisis Pengaruh pelaksanaan program terhadap kehidupan sosial masyarakat;</p> <p>9. Identifikasi hambatan dan permasalahan;</p> <p>10. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>						
2	Program Peningkatan Produksi Daging Sapi Nasional	<p>1. Analisis Keselarasan Kebijakan Peningkatan Produksi Daging Sapi dengan Kebijakan Nasional;</p> <p>2. Analisis Kebijakan untuk mencukupi/mengatasi isu/permasalahan Peningkatan Produksi Daging Sapi;</p> <p>3. Analisis ketepatan program/kegiatan serta dukungan anggaran dalam mengatasi isu/permasalahan;</p> <p>4. Analisis keberadaan SOP Peningkatan Produksi Daging Sapi serta Implementasinya;</p> <p>5. Analisis Pemaantauan Berkelanjutan oleh APIP;</p> <p>6. Analisis Penyerapan anggaran dan ketercapaian target kinerja program/kegiatan;</p> <p>7. Analisis Dampak pelaksanaan program terhadap peningkatan produksi daging sapi;</p>	D.1.2	SUMATERA UTARA			V	

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Analisis Pengaruh pelaksanaan program terhadap kehidupan sosial masyarakat;</li> <li>9. Identifikasi hambatan dan permasalahan;</li> <li>10. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</li> </ul>						
3	Program Pengembangan Budidaya Udang Vaname	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis potensi dan keselarasan strategi pengembangan budidaya udang vaname dengan metode <i>silvofishery</i> di Provinsi Riau;</li> <li>2. Analisis potensi peningkatan produktivitas budidaya udang vaname terhadap komoditas ekspor di Provinsi Riau;</li> <li>3. Analisis konsekuensi pengembangan budidaya udang vaname terhadap kelangsungan ekosistem sekitar;</li> <li>4. Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan budidaya udang vaname dengan metode <i>silvofishery</i> di Provinsi Riau;</li> <li>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan;</li> <li>6. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</li> </ul>	D.1.2	RIAU	V			
4	Program Pengembangan Industri Sagu	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis atas potensi dampak pengembangan industri sagu di Provinsi Riau;</li> <li>2. Evaluasi atas keselarasan kebijakan pengembangan industri sagu di Provinsi Riau;</li> <li>3. Evaluasi atas capaian kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan pengembangan industri sagu di Provinsi Riau;</li> </ul>	D.1.2	RIAU		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Evaluasi atas tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis pengembangan industri sagu di Provinsi Riau.						
5	Program Peningkatan Produktivitas Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis keselarasan kebijakan peningkatan produktivitas perikanan dengan kebijakan di tingkat Nasional;</li> <li>2. Analisis kecukupan kebijakan dalam menyentuh isu/permasalahan dalam peningkatan produktivitas perikanan;</li> <li>3. Analisis ketepatan program/kegiatan serta dukungan anggaran dalam mengatasi isu/permasalahan program;</li> <li>4. Analisis proses bisnis (SOP) pengelolaan dan implementasinya;</li> <li>5. Analisis pemantauan berkelanjutan dari APiP atas pelaksanaan program;</li> <li>6. Analisis tingkat penyerapan anggaran dan ketercapaian target kinerja peningkatan produktivitas perikanan;</li> <li>7. Analisis pengaruh pelaksanaan peningkatan produktivitas perikanan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.</li> </ol>	D.1.2	JAMBI		V		
6	Program <i>COMMUNITY BASED MARINE MANAGEMENT (CBMM)</i>	1. Evaluasi kebijakan program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil berbasis Masyarakat ( <i>Community Based Marine Management (CBMM)</i> ) telah sesuai dan berpedoman pada UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	D.1.2	BENGKULU	V			

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>Kecil yang telah diubah dengan UU 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>2. Evaluasi atas prioritas pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir;</p> <p>3. Evaluasi atas partisipasi aktif masyarakat pesisir yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dalam mengelola wilayah pesisir mengalami peningkatan;</p> <p>4. Evaluasi atas ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;</p> <p>5. Evaluasi atas hubungan peningkatan produktivitas perikanan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN);</p> <p>6. Analisis kontribusi sektor perikanan berpengaruh terhadap perekonomian regional (PDRB);</p> <p>7. Evaluasi atas pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat (Community Based Marine Management (CBMM)) telah dilaksanakan; dan</p> <p>8. Rekomendasi dan saran perbaikan untuk pengelolaan wilayah pesisir.</p>						
7	Program Peningkatan	1. Analisis keselarasan kebijakan dan	D.1.2	BENGKULU		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRAWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ketersediaan dan Ketahanan Pangan	<p>kelembagaan peningkatan dan ketahanan pangan khususnya pada sector pertanian;</p> <p>2. Analisis ketepatan program dan dukungan pendanaan;</p> <p>3. Analisis Kebijakan, tata kelola dan hambatan peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan pada sektor pertanian, salah satunya terkait dengan penurunan luas lahan sawah;</p> <p>4. Menilai peran pengawasan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan pada sector pertanian;</p> <p>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan;</p> <p>6. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>						
8	Program Gerakan Mandiri Pangan	<p>1. Analisis kecukupan dan Keselarasan kebijakan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan antar Pemangku Kepentingan;</p> <p>2. Analisis kelembagaan, sarana prasarana, dan ketersediaan anggaran dalam rangka peningkatan produktivitas karet;</p> <p>3. Analisis ketepatan pemilihan program dan kegiatan;</p> <p>4. Analisis ketersediaan anggaran, ketepatan Sasaran, waktu, jumlah pemberian bantuan dan pertanggungjawaban kegiatan;</p> <p>5. Analisis kebermanfaatan Program;</p> <p>6. Rekomendasi kebijakan strategis kepada</p>	D.1.2	SUMATERA SELATAN	V			

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pemangku kepentingan terkait.						
9	Program Perkebunan Karet Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi dan Analisis atas desain/kebijakan program dengan fokus pencapaian sasaran pembangunan yang telah berorientasi hasil;</li> <li>2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko serta permasalahan strategis tata kelola perkebunan karet;</li> <li>3. Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas tata kelola perkebunan karet;</li> <li>4. Analisis efektivitas program tata kelola perkebunan karet;</li> <li>5. Rekomendasi strategis ke Gubernur Sumatera Selatan/Presiden dan stakeholder lainnya.</li> </ol>	D.1.2	SUMATERA SELATAN	V			
10	Program Peningkatan Daya Saing Komoditas Kopi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Kecukupan dan keselarasan kebijakan Peningkatan Daya Saing Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Lampung dengan 4 kabupaten sentra Kopi Lampung dan stakeholder terkait lainnya;</li> <li>2. Analisis keberadaan, peran dan fungsi serta kontribusi masing-masing Instansi/Lembaga yang dibutuhkan dalam mengatasi isu/permasalahan strategis Peningkatan Daya Saing Komoditas Unggulan Kopi Lampung;</li> <li>3. Analisis keberadaan dan implementasi sistem prosedur Program Peningkatan Daya Saing Komoditas Unggulan Kopi Lampung;</li> <li>4. Analisis pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan Program Peningkatan Daya Saing</li> </ol>	D.1.2	LAMPUNG	V			

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>Komoditas Unggulan Kopi Lampung;</p> <p>5. Analisis ketepatan sasaran, indikator dan target Program Peningkatan Daya Saing Komoditas Unggulan Kopi Lampung;</p> <p>6. Analisis pencapaian target produksi;</p> <p>7. Analisis Peningkatan Produktivitas dan Mutu Komoditas Unggulan Kopi terhadap Kesejahteraan Petani Kopi.</p>						
11	Program Revitalisasi Tambak Udang	<p>1. Analisis keselarasan kebijakan revitalisasi tambak udang dengan kebijakan di tingkat Nasional;</p> <p>2. Analisis kecukupan kebijakan dalam menyentuh isu/permasalahan dalam revitalisasi tambak udang;</p> <p>3. Analisis ketepatan program/kegiatan serta dukungan anggaran dalam mengatasi isu/permasalahan revitalisasi tambak udang;</p> <p>4. Analisis peran para pihak yang terlibat dalam revitalisasi tambak udang;</p> <p>5. Analisis pemantauan berkelanjutan dari APIP atas pelaksanaan program;</p> <p>6. Analisis tingkat penyerapan anggaran dan ketercapaian target kinerja revitalisasi tambak udang;</p> <p>7. Analisis pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung revitalisasi tambak</p>	D.1.2	LAMPUNG		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		udang.						
12	Program Petani Milenial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Kebijakan dan Startegi Program “Petani Milenial” serta Sinkronisasinya dengan Kebijakan Nasional;</li> <li>2. Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Program “Petani Milenial”;</li> <li>3. Analisis Hubungan Program “Petani Milenial” terhadap Penciptaan Lapangan Kerja, Ketersediaan Produk Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Pemanfaatan Lahan BMD yang optimal, Penciptaan Pemasaran Produk Pertanian;</li> <li>4. Identifikasi Hambatan dan Masalah;</li> <li>5. Rekomendasi Kebijakan Strategis Kepada Pemangku Kepentingan.</li> </ol>	D.1.2	JAWA BARAT			V	
13	Program Pengembangan Agribisnis Ternak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi atas efektifitas program Pengembangan Agribisnis Peternakan terkait aspek kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Analisis identifikasi risiko dan permasalahan strategis dalam pelaksanaan program Pengembangan Agribisnis Peternakan. yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Evaluasi atas capaian kinerja dan akuntabilitas program Pengembangan Agribisnis Peternakan</li> </ol>	D.1.2	JAWA TENGAH			V	

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>4. Analisis kinerja program Pengembangan Agribisnis Peternakan yang dihubungkan dengan dampak indikator makro dan strategis;</p> <p>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan terkait program pengembangan agribisnis ternak;</p> <p>6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>						
14	Program Hilirisasi Perkebunan Tebu	<p>1. Analisis kebijakan dalam mendukung Produktivitas tebu dan industrialisasi gula termasuk sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota;</p> <p>2. Tata kelola program produktivitas tebu dan industrialisasi gula;</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja program produktivitas tebu dan industrialisasi Gula;</p> <p>4. Analisis dampak program/kegiatan yang mendukung peningkatan produksi tebu dan industrialisasi gula;</p> <p>5. Identifikasi hambatan/permasalahan dalam hilirisasi perkebunan tebu;</p> <p>6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>	D.1.2	JAWA TIMUR		V		
15	Program Perikanan	<p>1. Analisis kebijakan dan kelembagaan terkait</p>	D.1.2	JAWA TIMUR		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tangkap Laut dan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>dengan Program perikanan tangkap;</li> <li>2. Analisis tata kelola pengelolaan perikanan tangkap dan gambaran <i>supply chain</i>;</li> <li>3. Analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan;</li> <li>4. Analisis dampak kebijakan/kebermanfaatan Program;</li> <li>5. Identifikasi hambatan/permasalahan dalam program perikanan tangkap laut dan budidaya;</li> <li>6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</li> </ul>						
16	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis strategi dan kebijakan peningkatan konsumsi dan ekspor perikanan di wilayah Kalimantan Barat;</li> <li>2. Analisis ketepatan sasaran program;</li> <li>3. Analisis tata kelola perizinan perikanan;</li> <li>4. Identifikasi hambatan dan masalah;</li> <li>5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan.</li> </ul>	D.1.2	KALIMANTAN BARAT			V	
17	Program Tata Kelola Komoditas Beras	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis potret supply chain komoditas beras mulai dari luas lahan panen, produktivitas, tren hasil produksi serta penyediaan bahan baku industri komoditas beras;</li> <li>2. Analisis tata kelola program swasembada pangan;</li> <li>3. Analisis pengelolaan pasca panen;</li> <li>4. Analisis distribusi dan industrialisasi komoditas beras;</li> <li>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan</li> </ul>	D.1.2	KALIMANTAN TENGAH			V	

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		terkait program tata kelola komoditas beras; 6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.						
18	Program Budi Daya Komoditas Udang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis potret <i>supply chain</i> komoditas udang mulai dari luas lahan panen, produktivitas, tren hasil produksi, penyediaan bahan baku industri dan kontribusi ekspor komoditas udang;</li> <li>2. Analisis tata kelola program;</li> <li>3. Analisis pengelolaan pasca panen;</li> <li>4. Analisis distribusi dan industrialisasi komoditas udang;</li> <li>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan terkait program budidaya komoditas udang;</li> <li>6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</li> </ol>	D.1.2	KALIMANTAN TENGAH		V		
19	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan Sawit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis atas penilaian strategi pencapaian sasaran strategis untuk perkebunan Kelapa Sawit;</li> <li>2. Analisis Realisasi atas pencapaian target yang telah ditentukan dalam RPJM dan RKPD dalam Perkin Kepala Daerah dan Perkin Eselon II;</li> <li>3. Analisis terhadap <i>supply chain</i> komoditas kelapa sawit;</li> <li>4. Analisis perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah untuk perkebunan</li> </ol>	D.1.2	KALIMANTAN TIMUR		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>Kelapa Sawit;</p> <p>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan terhadap peningkatan produktifitas tanaman perkebunan sawit;</p> <p>6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>						
20	Program Pengelolaan Komoditas Tanaman Pangan	<p>1. Analisis atas Kebijakan terkait sektor pertanian tanaman pangan khususnya Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan;</p> <p>2. Analisis akuntabilitas kinerja khususnya Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan;</p> <p>3. Analisis atas Realisasi atau pencapaian target yang telah ditentukan dalam RPJMD, RKPD, Perkin Kepala Daerah, dan Perkin Eselon II yang terkait dengan indikator sasaran strategis dan atas realisasi program (meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan);</p> <p>4. Analisis kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap ekonomi daerah;</p> <p>5. Analisis kegiatan yang dilaksanakan terkait unsur-unsur Pembangunan Ekonomi Pangan dan Pertanian pada Tata Kelola Beras di Kalimantan Timur apakah telah mendukung pencapaian program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan;</p> <p>6. Identifikasi hambatan dan permasalahan</p>	D.1.2	KALIMANTAN TIMUR			V	

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>terhadap pengelolaan komoditas tanaman pangan;</p> <p>7. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>						
21	Program Hilirasi Komoditas Kelapa dan Turunannya	<p>1. Analisis atas kebijakan peningkatan hilirisasi produk kelapa dan turunannya;</p> <p>2. Analisis infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung peningkatan hilirisasi produk kelapa dan turunannya;</p> <p>3. Analisis akuntabilitas keuangan, tata kelola dan capaian kinerja program peningkatan hilirisasi produk kelapa dan turunannya;</p> <p>4. Analisis kebermanfaatan baik ketepatan sasaran dan keberlanjutan hasil dalam pengembangan peningkatan perluasan hilirisasi;</p> <p>5. Analisis dampak program peningkatan hilirisasi produk kelapa dan turunannya terhadap PDRB;</p> <p>6. Identifikasi hambatan dan permasalahan program peningkatan hilirisasi produk kelapa dan turunannya;</p> <p>7. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>	D.1.2	SULAWESI UTARA		V		
22	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	<p>1. Analisis terhadap strategi dan kebijakan yang mendukung Program Pengelolaan Perikanan Tangkap di wilayah Sulawesi Tengah;</p>	D.1.2	SULAWESI TENGAH		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Analisis terhadap Tata kelola pelaksanaan/proses bisnis Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;</li> <li>3. Analisis terhadap akuntabilitas Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang meliputi efektivitas pencapaian kinerja yang ditetapkan;</li> <li>4. Analisis dampak Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terhadap peningkatan perekonomian regional (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi;</li> <li>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan program pengelolaan perikanan tangkap;</li> <li>6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</li> </ul>						
23	Program Pembangunan Kawasan Pangan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis terhadap strategi dan kebijakan yang mendukung Kawasan Pangan Nasional di wilayah Sulawesi Tengah;</li> <li>2. Analisis terhadap Tata kelola pelaksanaan/proses bisnis Kawasan Pangan Nasional;</li> <li>3. Analisis terhadap akuntabilitas Kawasan Pangan Nasional yang meliputi efektivitas pencapaian kinerja yang ditetapkan;</li> <li>4. Analisis dampak Kawasan Pangan Nasional terhadap peningkatan perekonomian regional (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi;</li> <li>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan pembangunan kawasan pangan nasional;</li> </ul>	D.1.2	SULAWESI TENGAH			V	

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.						
24	Program Pengelolaan Perikanan Kawasan Fishery Triangle Kendari-Kolaka-Buton	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Implementasi Kebijakan Daerah tentang Pengelolaan Industri Pengolahan Ikan;</li> <li>2. Analisis terhadap Intervensi Penganggaran Pemerintah Daerah atas Pengelolaan Industri Pengolahan Ikan;</li> <li>3. Analisis terhadap Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;</li> <li>4. Analisis terhadap Kontribusi Industri Pengolahan Ikan terhadap Penerimaan Daerah</li> <li>5. Analisis terhadap pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Industri Pengolahan Ikan;</li> <li>6. Identifikasi dan analisis terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Pengelolaan Industri Pengolahan Ikan terkait dengan Perikanan Tangkap dan Budidaya;</li> <li>7. Rekomendasi Strategis dan Komprehensif atas permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan evaluasi.</li> </ol>	D.1.2	SULAWESI TENGGARA		V		
25	Program Optimalisasi Produksi Garam Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kebijakan optimalisasi produksi garam rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan;</li> <li>2. Analisis capaian program produksi garam rakyat;</li> <li>3. Analisis penyebab penurunan produksi garam rakyat;</li> </ol>	D.1.2	SULAWESI SELATAN			V	

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.						
26	Program Tata Kelola Komoditas Bawang Merah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis strategi dan kebijakan tata kelola bawang merah serta keselarasan terhadap potensi pangan;</li> <li>2. Analisis kelembagaan dan proses bisnis hortikultura bawang merah;</li> <li>3. Akuntabilitas keuangan dan capaian program Peningkatan produktivitas dan Kesejahteraan Petani komoditas bawang merah;</li> <li>4. Analisis kebermanfaatn program terhadap peningkatan Nilai Tukar Petani Petani (NTP) dan pengaruhnya terhadap indicator makro ekonomi.</li> </ol>	D.1.2	NTB			V	
27	Program Budidaya Sorgum Sebagai Pangan Alternatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis ketepatan dan keselarasan kebijakan pengembangan Budi Daya Tanaman Sorghum;</li> <li>2. Analisis ketepatan perencanaan dan penganggaran dalam pengembangan Tanaman Sorghum;</li> <li>3. Analisis kesiapan lahan, prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan Tanaman Sorghum;</li> <li>4. Analisis Jumlah Produksi dan Nilai Ekonomi Tanaman Sorghum;</li> <li>5. Analisis hambatan dan permasalahan pelaksanaan Budi Daya Tanaman Sorghum;</li> <li>6. Analisis efektivitas pelaksanaan Budi Daya</li> </ol>	D.1.2	NTT		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tanaman Sorghum; 7. Rekomendasi Kebijakan Strategis Kepada Pemangku Kebijakan Terkait.						
28	Program Tanam Jagung Panen Sapi - Pola Kemitraan	1. Analisis ketepatan dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan tanam jagung dan panen sapi pola kemitraan; 2. Analisis atas Ketepatan perencanaan dan penganggaran dalam program dan kegiatan tanam jagung dan panen sapi pola kemitraan; 3. Analisis atas kesiapan lahan, prasarana dan sarana yang mendukung program dan kegiatan tanam jagung dan panen sapi pola kemitraan; 4. Analisis atas jumlah produksi dan nilai ekonomi hasil program dan kegiatan tanam jagung dan panen sapi pola kemitraan; 5. Analisis hambatan dan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan tanam jagung dan panen sapi pola kemitraan; 6. Kesimpulan atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tanam jagung dan panen sapi pola kemitraan; 7. Rekomendasi Kebijakan Strategis Kepada Pemangku kebijakan Terkait.	D.1.2	NTT			V	
29	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1. Analisis terhadap kebijakan ( <i>grand desain</i> ) pengembangan sektor perikanan khususnya perikanan tangkap dan keterpaduan kebijakan ( <i>grand desain</i> ) pengembangan sektor perikanan tangkap di daerah (kementerian terkait,	D.1.2	PAPUA		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat);</p> <p>2. Analisis terhadap Sinkronisasi dan Kontinuitas perencanaan dan penganggaran program pengembangan perikanan tangkap setiap tahunnya antara pemerintah pusat (kementerian terkait) dan pemerintah daerah;</p> <p>3. Analisis terhadap Efektivitas pelaksanaan berbagai program pengembangan sektor perikanan tangkap yang dilaksanakan oleh kementerian terkait dan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah daerah;</p> <p>4. Analisis dampak pada peningkatan kesejahteraan para pelaku utama/pelaku usaha sektor perikanan tangkap pada pemerintah daerah dan PDRB Daerah dan peningkatan PAD;</p> <p>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan terkait pengembangan perikanan tangkap;</p> <p>6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>						
30	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Lada	<p>1. Analisis desain/kebijakan atas program peningkatan produktivitas tanaman Lada;</p> <p>2. Analisis capaian kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas program peningkatan produktivitas tanaman Lada;</p> <p>3. Analisis kinerja program peningkatan produktivitas tanaman Lada dihubungkan</p>	D.1.2	BANGKA BELITUNG		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>dengan aspek ekonomi pada petani Lada, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari pertanian;</p> <p>4. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis program peningkatan produktivitas tanaman Lada;</p> <p>5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>						
31	Program Peningkatan Perikanan Tangkap	<p>1. Analisis Kebijakan pengelolaan perikanan tangkap pada Pemerintah Provinsi Banten;</p> <p>2. Efektifitas pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan perikanan tangkap;</p> <p>3. Analisis hubungan program/kegiatan pengelolaan perikanan tangkap terhadap jumlah produksi ikan;</p> <p>4. Analisis hubungan jumlah Produksi Perikanan Tangkap terhadap PDRB;</p> <p>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan;</p> <p>6. Memberikan Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>	D.1.2	BANTEN		V		
32	Program Peningkatan Produktivitas Jagung	<p>1. Analisis Kebijakan Peningkatan Produktivitas Komoditas Jagung di Provinsi Gorontalo;</p> <p>2. Analisis Tata Kelola Peningkatan Produktivitas Komoditas Jagung di Provinsi Gorontalo;</p> <p>3. Analisis atas Akuntabilitas Keuangan dan capaian kinerja Program Peningkatan Produktivitas Jagung di Provinsi Gorontalo;</p> <p>4. Analisis peningkatan Produktivitas jagung</p>	D.1.2	GORONTALO			V	

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan nilai tambah dan degradasi lahan;</p> <p>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Peningkatan Produktivitas Jagung;</p> <p>6. Rekomendasi yang strategis dan komprehensif atas hambatan dan permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Peningkatan Produktivitas Jagung di Provinsi Gorontalo.</p>						
33	Program Peningkatan Produksi Jagung	<p>1. Analisis atas efektivitas Program Peningkatan Produksi Jagung terkait aspek kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kesinambungannya yang dilaksanakan Kementerian Pertanian serta Pemerintah Daerah;</p> <p>2. Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Program Peningkatan Produksi Jagung yang dilaksanakan Kementerian Pertanian serta Pemerintah Daerah;</p> <p>3. Analisis kinerja Program Peningkatan Produksi Jagung yang dihubungkan dengan peningkatan pendapatan petani dan pencapaian swasembada jagung nasional;</p> <p>4. Analisis identifikasi risiko dan permasalahan strategis dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Jagung yang dilaksanakan Kementerian Pertanian serta</p>	D.1.2	MALUKU UTARA				V

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemerintah Daerah; 5. Rekomendasi strategis untuk mengatasi permasalahan dalam Program Peningkatan Produksi Jagung di Maluku Utara.						
34	Program Peremajaan Sawit Rakyat dan Produktivitas Perkebunan Sawit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kebijakan pemda terkait dalam Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit;</li> <li>2. Analisis keselarasan kebijakan pemda dengan OPD Teknis terkait dalam Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit;</li> <li>3. Analisis identifikasi risiko dan permasalahan strategis dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit yang dilaksanakan Kementerian Pertanian serta Pemerintah Daerah;</li> <li>4. Analisis dukungan infrastruktur dalam Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit;</li> <li>5. Analisis dukungan jaringan pemasaran dalam pemasaran hasil produksi sawit melalui sistem informasi digital;</li> <li>6. Analisis identifikasi risiko kecurangan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit beserta rencana mitigasinya;</li> <li>7. Rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan dan implementasi program.</li> </ol>	D.1.2	KALIMANTAN UTARA		V		
<b>III</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>							
1	Program Pengelolaan	1. Analisis keselarasan kebijakan pengelolaan	D.2.3	SUMATERA			V	

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Limbah B3 Terintegrasi	<p>limbah B3 medis terintegrasi di tingkat Nasional dan analisis kecukupan kebijakan dalam menyentuh isu/permasalahan dalam pengembangan pusat pengolahan limbah B3 terintegrasi;</p> <p>2. Analisis ketepatan program/kegiatan serta dukungan anggaran dalam mengatasi isu/permasalahan pengelolaan limbah B3 medis terintegrasi;</p> <p>3. Analisis keberadaan dan kecukupan SOP pengelolaan limbah B3 medis terintegrasi dan implementasinya;</p> <p>4. Analisis keberadaan dan kecukupan kelembagaan peneglolaan limbah B3 medis terintegrasi;</p> <p>5. Analisis pemantauan berkelanjutan dari APIP atas pelaksanaan program.</p> <p>6. Analisis tingkat penyerapan anggaran dan ketercapaian target kinerja pengelolaan limbah B3 medis terintegrasi;</p> <p>7. Analisis pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasaran pengelolaan limbah B3 medis terintegrasi;</p> <p>8. Analisis kebermanfaatn atas aspek ekonomi dan lingkungan;</p> <p>9. Identifikasi hambatan dan permasalahan atas pengelolaan limbah terintegrasi;</p> <p>10. Rekomendasi strategi kepada pennagku</p>		BARAT				

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kepentingan terkait.						
2	Program Pengelolaan Air Limbah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis atas aspek kelembagaan, sejauhmana koordinasi/ sinergi diantara OPD dan atamaupun Badan Usaha yang terkait dalam mendukung pelaksanaan program secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan program;</li> <li>2. Analisis atas efektivitas keberhasilan program, mencakup output program, antara lain berupa capaian kinerja fisik dan keuangan pembangunan fisik prasana dan sarana pengelolaan air limbah Jakarta (IPAL, jaringan perpipaan beserta sarana pendukungnya), dan outcome program, seperti capaian peningkatan jumlah penduduk yang dapat terlayani SPALD dan pemenuhan standar baku mutu air limbah pasca pengolahan di IPAL, serta peningkatan perubahan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan yang nyaman;</li> <li>3. Analisis atas Risiko program yang belum teridentifikasi dan/atau dimitigasi;</li> <li>4. Hambatan pelaksanaan program dan solusi permasalahannya;</li> <li>5. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</li> </ol>	D.2.3	DKI JAKARTA				V
3	Program Penataan	1. Analisis desain kebijakan, strategi, serta pola-	D.2.3	DKI JAKARTA				V

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kawasan Pemukiman Kumuh	<p>pola penanganan yang efektif atas program Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;</p> <p>2. Analisis efektivitas implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;</p> <p>4. Analisis keberhasilan program terkait Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat;</p> <p>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat;</p> <p>6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>						
4	Program Pengelolaan Limbah B3	<p>1. Aspek Kebijakan mencakup keselarasan, kecukupan kebijakan yang ada dalam mengatur tata kelola limbah B3;</p> <p>2. Analisis Ketepatan Implementasi mencakup efektifitas penerapan kebijakan pengelolaan limbah B3;</p> <p>3. Analisis potensi mencakup informasi tentang</p>	D.2.3	KALIMANTAN SELATAN				V

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>kebutuhan pengolahan limbah B3 di Wilayah Kalimantan Selatan;</p> <p>4. Identifikasi permasalahan dan hambatan pengelolaan limbah B3;</p> <p>5. Rekomendasi strategi kepada pemangku kepentingan terkait.</p>						
5	Program Pengelolaan Sampah Provinsi Bali	<p>1. Analisis sinkronisasi kebijakan pengelolaan sampah;</p> <p>2. Analisis percepatan perbaikan tata kelola sampah hulu dan hilir;</p> <p>3. Analisis atas pembangunan infrastruktur TPST,</p> <p>4. Analisis atas kelembagaan pengelolaan sampah;</p> <p>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan terkait pengelolaan sampah provinsi Bali;</p> <p>6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>	D.2.3	BALI				V
6	Program Good Mining Practice Pasca Tambang Bauksit	<p>1. Analisis kebijakan atas reklamasi dan Pascatambang dengan kebijakan di tingkat nasional;</p> <p>2. Analisis kecukupan kebijakan Nasional dan Regional dalam menjadi regulasi tata kelola perizinan tambang dan tambang ilegal;</p> <p>3. Analisis Tata Kelola pemberian izin tambang;</p> <p>4. Analisis Manajemen Risiko kegiatan pemberian izin tambang;</p> <p>5. Analisis Tata Kelola Pengawasan atas pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca</p>	D.1.2	KEPULAUAN RIAU				V

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>tambang;</p> <p>6. Analisis akuntabilitas pemenuhan kewajiban dan jaminan reklamasi pascatambang bagi Pemegang IUP;</p> <p>7. Analisis implementasi kewajiban reklamasi pascatambang serta dampak kerusakan lingkungan;</p> <p>8. Analisis kewajiban reklamasi pascatambang dalam memberikan kontribusi PDRB.</p>						
7	Program Revitalisasi Danau Limboto	<p>1. Analisa integrasi program dan kegiatan penyelamatan Danau Limboto ke dalam dokumen tata ruang Provinsi Gorontalo;</p> <p>2. Analisa integrasi program dan kegiatan ke dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pemerintah daerah;</p> <p>3. Analisa keberadaan riset dan pemanfaatan hasil riset serta pemantauan, evaluasi, dan pengembangan basis data dan informasi Danau Limboto;</p> <p>4. Analisa pengembangan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan dan peningkatan peran pemangku kepentingan atas revitalisasi Danau Limboto;</p> <p>5. Analisa dampak revitalisasi Danau Limboto terhadap ekosistem perairan, ekosistem sempadan, dan daerah tangkapan air danau;</p> <p>6. Identifikasi Hambatan dan Permasalahan revitalisasi danau limboto;</p>	D.2.3	GORONTALO	V			

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7. Rekomendasi strategis terkait kepada pemangku kepentingan.						
<b>IV</b>	<b>PARIWISATA</b>							
1	Program <i>Jogya Smart Province (JSP)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis keselarasan, Ketepatan, pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan Jogja Smart Province (JSP) dimensi smart living pada sektor pariwisata;</li> <li>2. Analisis Tata Kelola pengembangan Jogja smart Province Dimensi <i>Smart Living</i>;</li> <li>3. Analisis akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja program-program yang mendukung pengembangan JSP dimensi smart living pada sektor pariwisata;</li> <li>4. Analisis efektivitas JSP dimensi <i>smart living</i> terhadap peningkatan kunjungan dan lama tinggal pariwisata di DIY;</li> <li>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan;</li> <li>6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan.</li> </ol>	D.1.4	D.I. YOGYAKARTA	V			
2	Program Akselerasi Sungai Martapura Asri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kesesuaian dan kecukupan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan dengan kebijakan di tingkat Nasional dalam menyelesaikan isu/permasalahan;</li> <li>2. Analisis implementasi program/kegiatan serta dukungan anggaran dalam mengatasi isu/permasalahan Program "Sungai Martapura Asri" dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;</li> </ol>	D.1.4	KALIMANTAN SELATAN		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Analisis kebermanfaatan dikaitkan akselerasi sektor kepariwisataan dari aspek ekonomi (<i>profit</i>), aspek lingkungan (<i>planet</i>), dan aspek sosial budaya (<i>people</i>);</li> <li>4. Analisis peran APIP dalam pelaksanaan program;</li> <li>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan pelaksanaan akselerasi sungai martapura asri;</li> <li>6. Rekoemndasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</li> </ul>						
3	Program Pengembangan dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis keselarasan kebijakan pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata Sulawesi Utara;</li> <li>2. Analisis infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung program pengembangan dan pemasaran pariwisata;</li> <li>3. Analisis akuntabilitas keuangan dan kinerja program terkait pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata;</li> <li>4. Analisis implementasi program yang didukung dengan tata kelola kelembagaan;</li> <li>5. Analisis terhadap APIP dalam pelaksanaan pemantauan atas kebermanfaatan, ketepatan dan objek/sasaran dan keberlanjutan atas pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata;</li> <li>6. Analisis kinerja Program pengembangan dan pemasaran pariwisata apakah telah</li> </ul>	D.1.4	SULAWESI UTARA		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>memberikan dampak pada indikator makro dan telah mencapai target yang ditetapkan;</p> <p>7. Identifikasi isu/permasalahan yang terkait dengan program pengembangan dan pemasaran pariwisata;</p> <p>8. Rekomendasi strategis kepada stakeholder terkait.</p>						
4	Program Pengembangan 99 Desa Wisata NTB Gemilang	<p>1. Analisis keberadaan, kecukupan dan keselarasan (antara pemerintah pusat dan daerah) kebijakan Pemerintah terkait pengembangan 99 desa wisata NTB Gemilang;</p> <p>2. Analisis tata kelola meliputi kelembagaan yang terlibat dalam pengembangan 99 desa wisata NTB Gemilang, perencanaan dan penganggaran, kecukupan sistem prosedur dan implementasinya, serta pelaporan dan pemantauan secara berkelanjutan;</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja;</p> <p>4. Analisis dampak/kebermanfaatan.</p>	D.1.4	NTB		V		
5	Program Pengembangan Pariwisata Budaya Anak Negeri	<p>1. Mengidentifikasi Kebijakan dan Menilai keselarasan atas perencanaan Program Budaya Anak Negeri di wilayah Provinsi Maluku;</p> <p>2. Menilai tata kelola, identifikasi risiko atas Program Budaya Anak Negeri di wilayah Provinsi Maluku;</p> <p>3. Menilai capaian kinerja, dan akuntabilitas Pelaksanaan Program Budaya Anak Negeri;</p> <p>4. Menilai keberlangsungan (<i>Sustainable</i></p>	D.1.4	MALUKU	V			

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p><i>development</i>) Program Budaya Anak Negeri;</p> <p>5. Menilai dampak Pelaksanaan Program terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Meningkatkan Kemandirian Fiskal, dan Membangun Maluku;</p> <p>6. Memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan.</p>						
6	Program Peningkatan Wisata Bahari Kaimana	<p>1. Analissi Kebijakan serta keselarasannya terhadap potensi pariwisata dan pemulihan ekonomi baik tingkat nasional/provinsi/kab/kota;</p> <p>2. Analisis Pemanfaatan infrastruktur serta sarana prasarana dari program/kegiatan yang sudah ada untuk pengembangan potensi pariwisata dan pemulihan ekonomi;</p> <p>3. Analisis Akuntabilitas, tata kelola, keberlanjutan serta ketepatan program/kegiatan dalam pengembangan potensi pariwisata dan pemulihan ekonomi;</p> <p>4. Analisis Kebermanfaatan, Ketepatan Objek/Sasaran dan Keberlanjutan (pemantauan oleh APIP) Hasil Program/Kegiatan untuk pengembangan potensi pariwisata dan pemulihan ekonomi;</p> <p>5. Analisis pengaruh atas program/kegiatan pengembangan potensi pariwisata dan pemulihan ekonomi terhadap PDRB/Perekonomian Daerah;</p> <p>6. Identifikasi hambatan dan permasalahan</p>	D.1.4	PAPUA BARAT	V			

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>program;</p> <p>7. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait baik tingkat nasional/provinsi/kab/kota.</p>						
7	Program Pengembangan Kawasan Pariwisata	<p>1. Analisis kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata pada Pemerintah Provinsi Banten;</p> <p>2. Analisis efektifitas pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan pariwisata;</p> <p>3. Analisis hubungan program/kegiatan pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata terhadap peningkatan kunjungan wisata;</p> <p>4. Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten;</p> <p>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan;</p> <p>6. Memberikan Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>	D.1.4	BANTEN			V	
8	Program Pengembangan Pariwisata	<p>1. Analisis kebijakan program pengembangan pariwisata Sulawesi Barat sebagai Provinsi Penopang Ibu Kota Negara (IKN);</p> <p>2. Analisis tata kelola program pengembangan pariwisata Sulawesi Barat sebagai Provinsi Penopang IKN;</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan program pengembangan pariwisata Sulawesi Barat;</p> <p>4. Akuntabilitas kinerja program pengembangan pariwisata Sulawesi Barat;</p>	D.1.4	SULAWESI BARAT	V			

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5. Analisis kesinambungan program pengembangan pariwisata Sulawesi Barat; 6. Analisis Efektivitas Program dan Kebermanfaatan program pengembangan pariwisata Sulawesi Barat; 7. Identifikasi hambatan dan permasalahan strategi pengembangan pariwisata Sulawesi Barat sebagai Provinsi Penopang IKN; 8. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan.						
<b>V</b>	<b>PEMBANGUNAN EKONOMI</b>							
1	Program Penguatan UMKM Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi	1. Analisis ketepatan dan keselarasan kebijakan penguatan UMKM; 2. Analisis ketepatan strategi pelaksanaan program penguatan UMKM; 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja pelaksanaan program; 4. Analisis efektivitas pelaksanaan program dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional (PDRB), dan menurunkan angka kemiskinan; 5. Identifikasi hambatan dan permasalahan; 6. Rekomendasi strategis perbaikan kebijakan dan implementasinya.	D.1.4	ACEH		V		
2	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Skema Hutan	1. Analisis desain kebijakan pengelolaan hutan dan perhutanan sosial di Sumatera Barat; 2. Analisis keberadaan, peran dan fungsi serta kontribusi masing-masing kelembagaan yang dibutuhkan;	D.1.3	SUMATERA BARAT				V

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Analisis ketepatan program/kegiatan/sub kegiatan, indikator dan target;</li> <li>4. Analisis kecukupan dan ketepatan sistem/prosedur serta implementasinya;</li> <li>5. Analisis pemantauan berkelanjutan dari APIP dan/atau pihak yang berwenang lainnya;</li> <li>6. Analisis tingkat penyerapan anggaran dan ketercapaian target kinerja;</li> <li>7. Analisis peningkatan produktivitas hasil hutan bukan kayu;</li> <li>8. Analisis peningkatan Nilai Tukar Petani Hutan;</li> <li>9. Analisis peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Barat;</li> <li>10. Identifikasi permasalahan/hambatan pencapaian program perhutanan sosial;</li> <li>11. Identifikasi rekomendasi strategis atas permasalahan/hambatan.</li> </ul>						
3	Program DUMISAKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis keselarasan kebijakan Program Dumisake dengan kebijakan di tingkat Nasional;</li> <li>2. Analisis kecukupan kebijakan dalam menyentuh isu/permasalahan Program Dumisake;</li> <li>3. Analisis ketepatan program/kegiatan serta dukungan anggaran dalam mengatasi isu/permasalahan Program Dumisake;</li> </ul>	D.2.3	JAMBI			V	

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Analisis keberadaan SOP penetapan penerima dan penyaluran bantuan;</li> <li>5. Analisis pemantauan berkelanjutan dari APIP atas pelaksanaan program;</li> <li>6. Analisis tingkat penyerapan anggaran dan ketercapaian target kinerja Program Dumisake;</li> <li>7. Analisis ketepatan sasaran, waktu dan jumlah untuk pemberian bantuan untuk Program Dumisake;</li> <li>8. Analisis pemanfaatan hasil Program oleh masyarakat penerima;</li> <li>9. Analisis pengaruh pelaksanaan Program Dumisake terhadap kondisi penerima manfaat dan perekonomian daerah.</li> </ul>						
4	Program Ekonomi Biru DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis keselarasan, ketepatan, implementasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi biru wilayah selatan DIY;</li> <li>2. Analisis Tata Kelola pengembangan ekonomi biru wilayah selatan yang meliputi kelembagaan, pengendalian dan pengawasan;</li> <li>3. Analisis akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program-program yang mendukung pengembangan ekonomi biru wilayah selatan;</li> <li>4. Analisis efektivitas pengembangan ekonomi biru wilayah selatan program untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan menurunkan kesenjangan wilayah DIY;</li> <li>5. Identifikasi hambatan dan permasalahan;</li> </ul>	D.1.4	D.I. YOGYAKARTA		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.						
5	Program Gerakan Membangun Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Kebijakan dan Startegi Program "Gerakan Membangun Desa" serta; Sinkronisasinya dengan Kebijakan Nasional;</li> <li>2. Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Program "Gerakan Membangun Desa";</li> <li>3. Analisis Hubungan Program "Gerakan Membangun Desa" terhadap pembangunan desa yang mandiri;</li> <li>4. Identifikasi Hambatan dan Masalah;</li> <li>5. Rekomendasi Kebijakan Strategis Kepada Pemangku Kepentingan.</li> </ol>	D.3.3	JAWA BARAT	V			
6	Program Pengentasan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis atas desain/kebijakan program meliputi aspek perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan pengawasan program dengan fokus pencapaian sasaran pembangunan yang telah berorientasi hasil yang tidak hanya berorientasi proyek atau kegiatan;</li> <li>2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko serta permasalahan strategis program;</li> <li>3. Analisis capaian kinerja, efektifitas dan akuntabilitas program;</li> <li>4. Identifikasi hambatan dan permasalahan atas program pengentasan kemiskinan</li> <li>5. Rekomendasi strategis ke Gubernur jawa</li> </ol>	D.2.3	JAWA TENGAH	V			

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tengah dan stakeholder lainnya dalam rangka penetapan kebijakan program tersebut.						
7	Program Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kecukupan dan ketepatan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kawasan perbatasan negara;</li> <li>2. Analisis koordinasi dan pengelolaan program/kegiatan di kawasan perbatasan negara;</li> <li>3. Analisa ketepatan program/kegiatan dan dukungan anggaran Pemda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan;</li> <li>4. Analisis tingkat penyerapan anggaran dan pencapaian output program/kegiatan Pemda;</li> <li>5. Analisis pencapaian sasaran program/kegiatan dengan target yang telah ditetapkan;</li> <li>6. Analisis pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana yang di bangun oleh K/L/D di Kawasan perbatasan negara;</li> <li>7. Analisis pengaruh pelaksanaan program/kegiatan dan K/L/D di kawasan perbatasan negara terhadap perekonomian, sosial dan keamanan kawasan;</li> <li>8. Rekomendasi strategis untuk memberikan mitigasi atas kebijakan yang akan datang.</li> </ol>	D.2.4	KALIMANTAN BARAT				V
8	Program Industrialisasi Asphalt Bitumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Implementasi Kebijakan Daerah tentang Pemanfaatan Aspal Buton;</li> <li>2. Analisis terhadap Intervensi Penganggaran</li> </ol>	D.1.2	SULAWESI TENGGARA			V	

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN HPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Buton Sulawesi Tenggara	<p>Pemerintah Daerah atas Pemanfaatan Aspal Buton;</p> <p>3. Analisis terhadap Akuntabilitas Keuangan dan capaian Kinerja program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara;</p> <p>4. Analisis terhadap Kontribusi Pemanfaatan Aspal Buton terhadap Penerimaan Daerah;</p> <p>5. Analisis terhadap pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemuatan Aspal Buton;</p> <p>6. Identifikasi dan analisis terhadap hambatan dan permasalahan;</p> <p>7. Rekomendasi Strategis dan Komprehensif atas permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan evaluasi.</p>						
9	Program Transformasi Ekonomi Bali Melalui Pengembangan Kawasan Wisata Ulan	<p>1. Analisis keberadaan, kecukupan dan keselarasan (antara pemerintah pusat dan daerah) kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar tentang pengembangan Kawasan Wisata;</p> <p>2. Analisis tata kelola meliputi kelembagaan yang terlibat dalam proses pengembangan desa wisata, perencanaan dan penganggaran, kecukupan sistem prosedur dan implementasinya, serta pelaporan dan pemantauan secara berkelanjutan;</p> <p>3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja</p> <p>4. Analisis dampak/kebermanfaatan;</p>	D.1.4	BALI		V		

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5. Identifikasi hambatan dan permasalahan terkait pengembangan kawasan wisata; 6. Rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan terkait.						
10	Program Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Analisis atas desain kebijakan program; 2. Akuntabilitas keuangan dan capaian kinerja program Pengawasan atas Program Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provisi Papua Barat; 3. Analisis dampak program terhadap tingkat perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; 4. Analisis dampak program terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Papua Barat; 5. Analisis efektivitas program terhadap terjaganya konservasi terutama di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; 6. Identifikasi hambatan dan permasalahan program pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 7. Rekomendasi Strategis kepada pemangku kepentingan terkait.	D.1.4	PAPUA BARAT				
11	Program Percepatan Program Pembangunan Kota Baru Sofifi	1. Analisis atas efektivitas Program Percepatan Pembangunan Ibukota Sofifi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan kesinambungan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR; 2. Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas	D.2.4	MALUKU UTARA				V

NO	TEMA/TOPIK	INFORMASI HASIL PENGAWASAN	RENDAL SUBSTANSI	PERWAKILAN BPKP	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>Keuangan Program Pembangunan Kota Baru Sofifi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Instansi Vertikal Lainnya;</p> <p>3. Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Baru Sofifi yang dihubungkan dengan dukungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam percepatan pembangunan ibukota Sofifi;</p> <p>4. Analisis Identifikasi Risiko dan permasalahan strategis dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan ibukota Sofifi;</p> <p>5. Rekomendasi strategis untuk digunakan oleh stakeholder dalam mengambil keputusan dalam rangka percepatan pembangunan Kota Sofifi.</p>						

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
MUHAMMAD YUSUF ATEH